YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 12 TAHUN 2008 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL (STUDI PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PEKANBARU)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu

Administrasi Publik

Pada Fakultas Ilmu Sosial dan lmu Politik

Universitas Islam Riau Pekanbaru

Merliana Nurfitrah

NPM : 167110829

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN

Nama	:	Merliana Nurfitrah
NPM	:	167110829
Program Studi	:	Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S.1)
Judul Usulan Penelitian	:	Implementasi Peraturan daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Kasus dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis Kota Pekanbaru).

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam usul penelitian ini telah dipelajari dan di nilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu di nilai layak serta dapat disetujui untuk diseminarkan.

Pekanbaru, 15 Oktober 2020

Turut Menyetujui Program Studi Administrasi Publik Ketua,	Pembimbing 1
Lilis Suriani, S.Sos.,M.Si	Lilis Suriani, S.Sos.,M.Si

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, penulis ucapakan puji syukur yang begitu mendalam kepada Allah SWT, karena berkat karunia kesehatan dan petunjuk dari Dia lah yang menuntun penulis untuk dapat menyelesaikan Usulan Penelitian ini yang dijukan sebagai persyaratan penyusunan Skripsi pada Bidang Ilmu Program Studi Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang berjudul "**Implementasi Peraturan daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru)".**

Dalam penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penlulisan penyelesaian Usulan Penelitian ini banyak pihak turut membantu. Sehubung dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapakan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. H. Moriss Adidi Yogia, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Bapak Lilis Suriani, S.Sos.,M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Eko Handrian S.Sos., M.S.i selaku Sekeretaris Program Studi Administrasi Publik, yang turut memberikan motivasi membimbing penulis dalam penulisan dan penyusunan Usulan Penelitian ini.
5. Ibu Lilis Suriani, S.Sos.,M.Si yang senantiasa memberikan bimbingan serta saran dan pedoman sehingga usulan penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah mendidik kepada penulis baik dilingkungan kampus maupun diluar lingkungan kampus.
7. Bapak dan ibu Kepala Tata Usaha beserta Staff pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang senantiasa memberikan bantuan administratif kepada penulis sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan dengan baik.
8. Terkhususnya untuk Ayahanda saya Bapak H. Pawit dan Hj. Ibunda Nurbaya yang selalu mendoakan dan tidak pernah lelah memberikan motivasi penulis untuk bisa menyelesaikan usulan penelitian ini.
9. Kepada kakakku Yuli dan kakakku Susi serta Adikku Bambang yang selalu memberikan semangat serta motivasinya untuk penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

10. Sahabat-sahabatku Afandi, Irma, Siti, Reni, Khoiru, Chitra, Olin, Anissa, Putri yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan Usulan Penelitian ini.
11. Teman-teman seperjungan Jurusan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2016 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberi pahala atas jasa dan kebaikan mereka semua dan penulis sadar bahwa Usulan Penelitian ini masih banyak kekuranganya. Oleh karenanya, penulis tidak menutup diri untuk mendapat kritik dan saran yang tentunya dan lebih membuka cakrawala penulis dalam menyelesaikan Usulan Penelitian ini lebih baik lagi.

Akhirnya penulis berharap semoga hasil Usulan Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Wabillahitaufik walhidayaah, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 15 Oktober 2020

Penulis

Merliana Nurfitrah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....ii

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISI.....vi

DAFTAR TABEL.....ix

DAFTAR GAMBAR.....x

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....xiii

ABSTRAK.....xiv

ABSTRACK.....xv

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang.....1
B. Rumusan Masalah.....17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....17
   1. Tujuan Penelitian.....17
   2. Kegunaan Penelitian.....17

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....18

A. Studi Kepustakaan.....18
   1. Konsep Administrasi.....18
   2. Konsep Administrasi Publik.....20
   3. Konsep Organisasi.....21
   4. Konsep Manajemen.....23
   5. Konsep Kebijakan.....25
   6. Konsep Kebijakan Publik.....26
   7. Konsep Implementasi.....28
   8. Konsep Penanganan.....32
   9. Konsep Gelandangan Dan Pengemis.....33

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

10. Konsep Kemiskinan 35
B. Kerangka Pikir 37
C. Konsep Operasional 38
D. Operasional Variabel.....40
BAB III METODE PENELITIAN 42
A. Tipe Penelitian 43
B. Lokasi Penelitian.....43
C. Jenis Dan Sumber Data.....43
D. Informan dan Keyinforman.....44
E. Teknik Pengumpulan Data.....46
F. Teknik Analisa Data.....47
G. Jadwal Kegiatan Penelitian 47
H. Rencana Sistematika Penelitian 48
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 51
A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru.....51
B. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Pekanbaru 56
C. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....59
D. Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja.....61
E. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja 63
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 83
A. Identitas Responden 83
1. Identitas Key Informan.....83
2. Identitas Responden Masyarakat.....84
3. Identitas Responden Gelandangan dan Pengemis 84
B. Pembahasan Peneliti Implementasi Peraturan Daerah NO 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Penanganan Gelandangan dan Pengemis) .85
1. Komunikasi 86
2. Sumber Daya 96
3. Disposisi 100
4. Struktur Birokrasi 106

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Analisis Hasil Penelitian Implementasi Peraturan Daerah NO 12 Tahun2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru) 109
D. Faktor Penyebab Munculnya Gelandangan dan Pengemis 111
BAB VI PENUTUP 113
A. Kesimpulan.....113
B. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru.....114
C. Saran.....116
DAFTAR PUSTAKA 117
LAMPIRAN.....120

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Jumlah Gelandangan Dan Penegemis (Gepeng) Hasil Pra Survey Penelitian 11
1.2 Data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahtraan Sosial) Binaanshelter Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2018 – 2019 12
1.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tim Reaksi Cepat (TRC) Tahun 2019 13
II.1 Operasional Variabel Tentang Implementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru) 40
III.1 informan dan key informan tentang implementasi peraturan daerah no 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial (studi penanganan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru) 45
III.2 jadwal waktu kegiatan penelitian tentang implementasi peraturan daerah no 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial (studi penanganan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru) 47
IV.1 Jumlah Penduduk Dan Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan Di Kota Pekanbaru Tahun 2020 57
IV.2 Jumlah Penduduk Menurut Umur Berdasarkan Kecamatan Di Kota Pekanbaru Tahun 2020 58
V.1 Indentitas Key Informan 83
V.2 Identitas Responden Masyarakat 84
V.3 Gelandangan Dan Pengemis Indentitas Responden 84

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR GAMBAR

Gambar | Halaman

II.1 Kerangka Pikir Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah No 12 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Kota Pekanbaru 37
VI.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....66
VI.2 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja 76

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Daftar Wawancara Dinas Sosial Kota Pekanbaru Untuk Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru Mengenai Implementasi Peraturan Daerah No.12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru).....122
2. Daftar Wawancara Dinas Sosial Kota Pekanbaru Untuk Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru Mengenai Implementasi Peraturan Daerah No.12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru 126
3. Daftar Wawancara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Kota Pekanbaru Mengenai Implementasi Peraturan Daerah No.12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru 130
4. Daftar Wawancara Bidang Operasi Dan Ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Kota Pekanbaru Mengenai Implementasi Peraturan Daerah No.12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru 134
5. Daftar Wawancara Gelandangan Dan Pengemis Kota Pekanbaru Mengenai Implementasi Peraturan Daerah No.12 Tahun 2008tentang Ketertiban Sosial (Studi Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru.....138
6. Daftar Wawancara Masyarakat Yang Masuk Dalam Ruang Lingkup Operasi Gelandangan Dan Pengemis Kota Pekanbaru Mengenai Implementasi Peraturan Daerah No.12 Tahun 2008tentang Ketertiban Sosial (Studi Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru 142
7. Daftar Wawancara Masyarakat Pengguna Jalan Yang Melintasi Lokasi Operasi Gelandangan Dan Pengemis Kota Pekanbaru Mengenai Implementasi Peraturan Daerah No.12 Tahun 2008tentang Ketertiban Sosial (Studi Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru 146

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

8. Hasil Wawancar Sub Indicator Impelementsai Peraturan Daerah No.12 Tahun 2008tentang Ketertiban Sosial (Studi Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru.....148
9. Dokumentasi Foto Penelitian Impelementsai Peraturan Daerah No.12 Tahun 2008tentang Ketertiban Sosial (Studi Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru.....161
10. Surat Rekomendasi Dari Ketua Program Studi Dan Wakil Dekan 1 Usulan Dosen Pembimbing..... 171
11. Surat Rekomendasi Dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilpolitik.....172
12. Surat Rekomendasi Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 173
13. Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian Dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru 174
14. Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian Dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.....175

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Merliana Nurfitrah
NPM	: 167110829
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi	: Implementasi Peraturan daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Penanganan Gelandangan dan Pengemis Kota Pekanbaru).

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian daan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademi dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Oktober 2020
Pelaku Pernyataan,

Merliana Nurfitrah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 12 TAHUN 2008 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL (STUDI PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PEKANBARU)

ABSTRAK

Oleh

Merliana Nurfitrah

Kata Kunci, Implementasi, Peraturan Daerah, Gelandangan dan Pengemis

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah NO 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru). Indikator penilaian yang digunakan meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Tipe Penelitian ini menggunakan Deskriptif Kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosialnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneliti ini adalah tenkis observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif Kualitatif, yaitu data yang terkumpul diolah dan di analisis dengan menguraikan serta mengaitkan degan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, dan di tabulasi sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing lalu membrikan interpretasi terhadap hasil yang relevan, kemudian ditarik kesimpulan dan saran. Informan dan Key informan dalam penelitian ini terdiri dari (1) Dinas Sosial sebanyak 2 orang (2) pihak Satpol PP sebanyak 2 orang (3) masyrakat Kota Pekanbaru sebanyak 10 orang (4) gelandangan dan pengemis sebanyak 2 orang. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah NO 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru) belum berjalan dengan baik, karena terdapat beberapa permasalahan yaitu masih lemahnya pengawasan Satpol PP dan Dinas Sosial terhadap gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di Kota Pekanbaru, pembinaan hanya diberikan kepada gelandangan dan pengemis kurang efektif, kurangnya dana dalam penertiban dan pembinaan dan masih lemahnya Sumber daya manusia (SDM) Dinas Sosial dalam memberikan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis yang terjaring.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NO. 12 OF 2008 CONCERNING SOCIAL ORDER (STUDY OF THE HANDLING OF HOMELESS AND BEGGARS IN THE CITY OF PEKANBARU)

ABSTRACK

by

Merliana Nurfitrah

Keywords, Implementation, Regional Regulation, Homeless And Beggars

The study is the determine and analyze the Implementation Of Regional Regulation No 12 Of 2008 Concerning Social Order (Study Of The Handling Of Homeless And Beggars In The City Of Pekanbaru). The assesssment indicators used include communication, resources, disposition, bureaucratic structure. This type of research used descriptive qualitative, namely research that seeks to analyze social life by describing the social world. The data collection techniques used in the research are observation, interview, and docuentation techniques. Then the data analysis techniques that the writer uses in this research is descriptive qualitative, that is, the data collected is processed and analyzed by describing and relating to theories that are in accordance with the existing problems, and tabulated according ti the arrangement of the data presentations needed to answer. Each then provides an interpretation of the relevant result, then draws conclusions and suggestions. Informants and key informants in this study consisted of (1) Social Service as many as 2 people (2) Satpol PP as many as 2 people (3) Pekanbaru City community as many as 10 people (4) homeless people and 2 beggars. Based on this analysis technique, the researcher assesses and concludes that Regional Regulation No. 12 of 2008 concerning Social Order (Study of the Management of Homeless and Beggars in Pekanbaru City) has not been going well, because there are several problems, namely the weak supervision of Satpol PP and the Social Service againts homeless people and beggars. Who roam the city of Pekanbaru, guidance is only given to homeless people and beggars are less effective, lack of funds in policing and guidance and still weak Human Resources (HR) ofthe Social Service in providing guidance to homeless and netted beggars.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah karya terstruktur yang mempunyai implikasi luas terhadap kualitas hidup manusia. Hal ini karena konstruksi pembangunan terdiri atas serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan manusia. Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang terangkum dalam program Nawa Cita Presiden Joko Widodo yaitu Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar", serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial , juga mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia.

Pembangunan kesejahteraan sosial sesuai dengan UU NO 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang telah dilaksanakan pada umumnya telah memberi kontribusi peran pemerintah dan masyarakat di dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang makin adil dan merata. Sasaran utama program pembangunan kesejahteraan sosial adalah manusia, maka perubahan-perubahan yang secara langsung terkait dengan sasaran program tersebut terutama permasalahan dan kebutuhannya, serta ukuran-ukuran taraf kesejahteraan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sosialnya sangat berpengaruh terhadap arah, tujuan dan kegiatan-kegiatan program.

Permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan manusia tidak terlepas dari kondisi dan perubahan lingkungan baik fisik maupun non-fisik. Maka perencanaan yang lebih cermat perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek manusia, lingkungan fisik, sosial dan lingkungan strategisnya. Hal ini akan mengkaitkan pembangunan kesejahteraan sosial dengan bidang pembangunan yang lain; ekonomi, politik, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tugas dari pemerintah Negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Istilah "kesejahteraan umum" yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 mempunyai arti yang sama dengan istilah "kesejahteraan sosial" yang tercantum dalam BAB XIV UUD 1945 (Fahruddin, 2012). Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Meskipun pembangunan kesejahteraan sosial secara nyata telah memberikan kontribusi di dalam meningkatkan kesejahteraan umum serta peran aktif masyarakat dan pemeliharaan iklim yang kondusif, namun dengan terjadinya perubahan-perubahan didalam kehidupan masyarakat, maka perencanaan strategis jangka menengah yang merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

acuan rencana tahunan perlu dirumuskan dengan mengedepankan prioritas-prioritas, sasaran program, lokasi dan kegiatan yang dapat segera mengurangi beban masalah, mendukung terwujudnya rasa aman, yang tidak hanya ditujukan kepada masyarakat rentan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI NO 08 Tahun 2012 saja, melainkan juga pada keberperanan dan keberdayaan sosial masyarakat secara lebih komprehensif.

Dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan daerah, maka perlu dilaksanakan pembangunan di sektor sosial dengan berbagai macam kegiatan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kota Pekanbaru sehingga dapat didayagunakan secara optimal, efisien dan efektif.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru di bentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok OPD - OPD dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru adalah sebagai salah satu Daerah Otonomi yang diberikan kewenangan menjalankan urusan-urusan pemerintah saat ini. Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau mempunyai peranan yang sangat penting untuk menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupanya. Kemajuan Kota Pekanbaru ini sangat baik, sehingga untuk mengantisipasi kegiatan yang menggangu kepentinagn umum

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

maka pemerintah kota Pekanbaru dituntut untuk lebih proaktif dalam mewujudkan ketertiban umum.

Untuk mewujudkan ketertiban umum di Kota Pekanbaru pemerintah Kota Pekanbaru menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial. Didalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 12 Tahun 2008 di menjelaskan bahwa, Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dalam mengembara ditempat umum. Kemudian Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain. Jadi, Gelandnagan pengemis adalah seseorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis.

Faktor Penyebab Munculnya Gelandangan dan Pengemis

Menurut Buku Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis. Selain faktor eksternal dan faktor internal ada pula beberapa hal yang mempengaruhi seseorang menjadi gelandangan yaitu:

1. Tingginya tingkat kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Rendahnya tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah dapat menjadi kendala seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
3. Kurangnya keterampilan kerja. Kurangnya keterampilan kerja menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi tuntutan pasar kerja.

Faktor sosial budaya antara lain :

Ada beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi seseorang menjadi gelandangan dan pengemis yaitu:

a. Rendahnya harga diri pada sekelompok orang, mengakibatkan tidak dimilikinya rasa malu untuk meminta-minta.
b. Sikap pasrah pada nasib, mereka menganggap bahwa kemiskinan dari kondisi mereka sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib sehingga tidak mau melakukan perubahan.
c. Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang. Ada kenikmatan tersendiri bagi sebagian besar gelandangan dan pengemis yang hidup menggelandang. Karena mereka merasa tidak terikat oleh aturan atau norma yang kadang-kadang membebani mereka, sehingga mengemis menjadi salah satu mata pencaharian. (Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Depso RI. 2005 : 7-8).

Keberadaan gelandang dan pengemis di Kota Pekanbaru merupakan salah satu tantangan dalam mewujudkan cita-cita pemerintahan daerah Kota Pekanbaru untuk mewujudkan menjadi Kota yang indah, tertib dan aman. Pada hakekatnya kehadiran pengemis diteengah masyarakat Kota Pekanbaru sangat meresahkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masyrakat Kota Pekanbaru. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial menyatakan adanya larangan di Kota Pekanbaru. Isi dari larangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dilarang melakukan pengemisan didepan umum dan di tempat umum jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan.
2. Dilarang bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada dan pengemis di jalan raya, jalur hijau dan persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan atau ditempat-tempat umum.
3. Dilarang bergelandangan tanpa pencaharian ditempat umum dijalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan.

Kemudian Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial menyatakan adanya larangan di Kota Pekanbaru. Isi dari larangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang atau kelompok dilarang melakukan usaha penampungan, membentuk atau mengorganisir gelandangan dan pengemis serta mengeksploitasi mereka yang bertujuan mencari keuntungan materi semata dengan memanfaatkan mereka.
2. Setiap orang atau badan dilarang menggunakan, menyediakan tempat/bangunan rumah/pertokoan untuk digunakan sebagai tempat penampungan gelandnagan dan penemis.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari pasal diatas sudah dijelaskan bahwa dilarang bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada gelandangan dan penegmis dijalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan atau ditempat-tempat umum. Dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan terhadap pasal 7 tentang penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial, pada BAB IV Pasal 7 mengenai Prinsip-prinsip Penananagan Gelandangan dan Pengemis yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip penerimaan gelandangan dan pengemis secara apa adanya.
2. Prinsip tidak menghakimi *(Non Judemental)* gelandangan dan pengemis
3. Prinsip individualisme, dimana setiap gelandangan dan pengemis tidak disama ratakan begitu saja, tetapi harus dipahami secara khusus sesuai dengan keunikan pribadi dan masalah mereka masig-masing.
4. Prinsip kerahasiaan, dimana setiap informasi yang diperoleh dari gelandangan dan pengemis dapat dijaga kerahasiaannya sebaik mungkin, terkecuali digunakan untuk kepentingan pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis itu sendiri.
5. Prinsip partisipasi, dimana gelandangan dan pengemis beserta orang-orang terdekat dengan dirinya diikut sertakan dan dapat berperan optimal dalam upaya pelayanan dan rehabilitasinya kembali ke masyarakat.
6. Prinsip komunikasi, dimana kualitas dan intensitas komunikasi anatara gelandangan dan pengemis dengan keluarga dan lingkungan sosialnya dapat ditingkatkan seoptimal mungkin sehingga berdampak positif terhadap upaya rehabilitasi gelandangan dan pengemis.
7. Prinsip kesadaran diri, dimana para pelaksana pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis secara sadar wajib menjaga kualitas hubungan profesionalitasnya dengan gelandangan dan pengemis, sehingga tidak jatuh dalam hubungan emosional yang menyulitkan dan menghambat keberhasilan pelayanan.

Berdasarkan pasal diatas prinsip-prinsip penanganan gelandangan dan pengemis dapat disimpulkan bahwa, prinsip penerimaan gelandangan dan pengemis ini tidak bersifat menghakimi, tidak saling merendahakan anatara satu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan lainnya, diberi pengarahan secara baik dan benar, dan mempunyai komunikasi yang sangat baik terhadap lingkungan yang ada disekitarnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas- dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah kota di bidang Kesejahteraan Sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 tahun 2016, Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai berikut :

1. Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru.
2. Penyusunan pelaksanaan rencana program dibidang pembinaan teknis Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru.
3. Melakukan pengelolaan, penyelenggaraan dan penyuluhan Usaha Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru.
4. Pelaksanaan pembinaan, pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan kepada klien untuk usaha kesejahteraan sosial.
5. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pemantauan kepada kelayan yang telah dilatih dan diberi bantuan.
6. Pengelolaan dan Pengolahan serta pengumpulan data dan informasi serta evaluasi kegiatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
7. Pelaksanaan Koordinasi antar instansi terkait, lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
8. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan.
9. Pengelolaan Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) Melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pengurus Karang Taruna dan lembaga sosial Masyarakat di kelurahan/desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adapun program-program kerja Dinas Sosial dalam mengangani gelandangan dan pengemis yang berkaitan dengan penjelasan BAB IV Pasal 7 yaitu sebagai berikut:

1. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan pnyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin, peningkatan manajemen usaha bagi keluarga miskin.
2. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasaran publik bagi penyandang cacat dan lansia, pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, pelaksanaan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesajateraan sosial (PMKS), pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal, peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial.
3. Program pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma, pendataan penyandang dan disabilitas dan penyakit kejiwaan, pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma, pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma.

Upaya penanganan gelandangan dan pengemis dari Dinas Sosial anatara lain yaitu:

1. Usaha Represif yaitu untuk mengurangi atau meniadakan gelandanga dan pengemis yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan gelandangan dan pengemis.
2. Razia dengan melakukan pembinaan dan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis, dan berkoordinasi dengan Satpol PP dalam penertiban kota melalui kegiatan razia secara rutin terhadap gelandangan dan pengemis yang berkeliaran ditempat-tempat umum seperti dipersimpangan, trafick light, rumah makan, pusat perbelanjaan, dan tempat-tempat umum lainnya.
3. Penampungan sementara untuk diseleksi dan pendataan bagi gelandangan dan pengemis dengan tujuan untuk menentukan kualifikasi pelayanan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sosial yang akan diberikan, dan bimbingan agar dapat merubah sikap mental gelandnangan dan pengemis dari keadaaan yang non produktif menjadi produktif.

4. Pendidikan dan pelatihan. Dari hasil seleksi dan identifikasi, pendataan gelandangan dan pengemis yang penduduk Kota Pekanbaru akan diberi bimbingan, pendidikan latihan baik fisik, mental maupun serta keterampilan kerja untuk menunjang kehidupanya. Sedangkan pendatang yang bukan dari Kota Pekanbaru di pulangkan ketempat asalnya.
5. Pemulangan kedaerah asal bagi gelandangan dan pengemis yang tidak berdomisili di Kota Pekanbaru yang pada umumnya berasal dari Provinsi tetangga.
6. Melakukan himbuan-himbuan kepada masyarakat baik melalui media massa yang anatara lain media cetak maupun media elektronik, pemasangan billboard dan penyebaran sticker ditempat-tempat umum dengan harapan masyarakat dapat berpartisipasi dalam penanggulangan gelandanga dan pengemis.

Dalam hal ini Dinas Sosial bekerja sama dalam penertiban gelandanagan dan pengemis dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bekerja sama dengan pihak kepolisian. Satpol PP mempunyai Tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat perlindungan masyrakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyrakat serta perlindungan masyrakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan Kepala daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat daerah.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya.
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaaati Perda dan Peraturan kepala daerah.
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Wewenang dari satuan polisi pamong praja pasal 6 PP No 6 Tahun 2010:

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah.
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang menggangu ketertiban umum dan ketenteraman masyrakat.
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.
5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Berdasarkan program-program yang telah di buat dan di laksanakan dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis, ternyata fakta yang terjadi di lapangan masih banyak gelandangan dan pengemis yang masih berkeliaran di sudut-sudut Kota Pekanbaru baik itu di pagi hari, sian hari, dan malam hari.

Kota Pekanbaru termasuk Kota yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini menyebabkan tumbuhnya masalah-masalah sosial, seperti banyaknya gepeng yang meminta-minta di tempat umum. Sebagimana yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 : Jumlah Gepeng Hasil Survey Penelitian

No	Tempat	Jumlah
1.	Di persimpangan lampu merah pasir putih	3 orang
2.	Di persimpangan lampu merah simpang tiga (Teukubey)	5 orang
3.	Di persimpangan lampu merah pasar pagi arengka	5 orang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sumber : Hasil Survey Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru masih tergolong tinggi namun gelandangan dan pengemis tersebut belum tertangani secara keseluruhan oleh pihak Dinas Sosial sehingga saat ini jumlah nya masih cukup banyak.

Tabel 1.2 : Data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Binaan Shelter Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2018 – 2019

No	Tahun Terjaring	Terjaring	Dipulangkan (Luar Pekanbaru)	Dijemput Keluarga (Pekanbaru)	Jumlah
1.	2018	155	133	22	155
2.	2019	48	35	23	48
Jumlah		203	168	45	203

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa pada tahun 2018 ada sebanyak 155 gelandangan dan pengemis (Gepeng) yang tertangkap atau terjaring dan 133 gepeng yang di pulangkan dari luar kota Pekanbaru dan 22 gepeng yang di jemput oleh keluarga yang ada di Pekanbaru. Dan pada tahun 2019 ada 48 gepeng yang terjaring oleh Dinas Sosial 35 gepeng di pulangkan ke kota asal nya karana luar Pekanbaru dan 23 gepeng dijemput oleh keluarganya karena memang berasal dari Kota Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dapat di simpulkan bahwa gelandangan dan pengemis (Gepeng) di Kota Pekanbaru memang mengalami penurunan namun gelandangan dan pengemis tersebut belum tertangani secara keseluruhan oleh pihak Dinas Sosial sehingga saat ini jumlah nya cukup banyak.

Sepanjang tahun 2019 Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah melakukan kegiatan Tim Reaksi Cepat (TRC) yaitu pemantauan dan penanganan terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng). Kegiatan ini dilakukan selama 20 hari kerja/perbulan. Tim TRC dibagi menjadi dua tim satu tim terdiri dari empat orang. Pemantauan dan penanganan ini dilakukan pada pagi hari pukul (10.00 WIB s/d 12.00 WIB) dan sore hari pukul (14.00 WIB s/d 16.00 WIB). Tim TRC wajib menangani atau merespon kausus yang terjadi diluar jam kerja (tim siap on call).

Tabel 1.3 : Pelaksanaa Kegiatan Tim Reaksi Cepat (TRC) Tahun 2019

No	Jenis Kegiatan	Lokasi
1.	Pemantauan dan Penanganan	Persimpangan lampu merah pintu masuk bandara SSK II
2.	Pemantauan dan Penanganan	Persimpangan lampu merah marpoyan
3.	Pemantauan dan Penanganan	Persimpangan lampu merah pasar pagi arengka
4.	Pemantauan dan Penanganan	Persimpangan lampu merah arengka II tabek gadang
5.	Pemantauan dan Penanganan	Persimpangan lampu merah SKA
6.	Pemantauan dan Penanganan	Persimpangan lampu merah sigunggung/jl. Durian
7.	Pemantauan dan Penanganan	Persimpangan lampu merah polda
8.	Pemantauan dan Penanganan	Persimpangan lampu merah Gramedia nangka
9.	Pemantauan dan Penanganan	Persimpangan lampu merah harapan raya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

10.	Pemantauan dan Penanganan	Pasar ramayana
11.	Pemantauan dan Penanganan	Komplek masjid An-Nur

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2019.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak titik lokasi gelandangan dan pengemis yang perlu ditangani oleh Dinas Sosial. titik lokasi yang paling banyak di temukan gelandangan dan pengemis yaitu persimpangan Mall SKA, Persimpangan Tabek Gadang dan persimpangan lampu merah menuju Bandara SSK II.

Berdasarkan observasi peneliti, peneliti menemukan belum terlaksananya dengan baik Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial. Hal itu terlihat dari masalah banyak nya masyarakat yang memberikan sumbangan kepada para gepeng dengan alasan yang bermacam-macam. Namun, sejauh ini masyrakat dan gepeng tidak pernah diberikan sanksi oleh Pemerintahan Kota Pekanbaru sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum Pasal 29 yaitu:

1. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling bayanyk Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari pasal diatas dapat kita ketahui bahwa pemerintah Kota Pekanbaru melarang keras setiap orang untuk memberi sumbangan kepada gepeng, karena hal itu akan membuat keberadaan gepeng semkin berkembang. Sehingga gepeng tersebut memilih profesi meminta-minta yang berpenghasilan lebih besar dari pada mencari pekerjaan yang lain. Dapat kita ketahui bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru melang keras bagi setiap orang yang meninta-minta atau bergelandangan ditempat umum, jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan.

Upaya yang sulit dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru terkait gelandangan dan pengemis adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Kurangnya tingkat kemandirian para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), walaupun telah diberikan pelatihan dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru;
3. Keterbatasannya anggaran untuk penanganan dan pemberian rehabilitasi pemberdayaan dan perlindungan sosial oleh PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).
4. Kurangnya partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
5. Kurangnya kualitas SDM penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial, terutama yang berpendidikan Kesejahteraan Sosial;
6. Belum adanya sarana dan prasarana yang representatif (sesuai dengan fungsi nya) untuk melaksanakan pelayanan sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru.

Walaupun pelaksanaan peraturan sudah dijalankan cukup lama akan tetapi berdasarkan observasi dan wawancara masih terdapat beberapa fenomena yang berhubungan dengan pelaksanaan peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2008 yaitu gelandangan dan pengemis (Gepeng) sebagian dari mereka ada yang benar-benar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hidup sebagai gelandangan dan pengemis (asli) untuk menghidupi dirinya sendiri, ada yang mencari kekayaan, keuntungan dan berpura-pura menjadi orang susah tanpa mau berusaha bekerja.

Dari deskripsi diatas dapat disimpulkan beberapa fenomena, yaitu:

1. Kurangnya kualitas SDM penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial serta partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial (gelandangan dan pengemis) di Kota Pekanbaru.
2. Penanganan sulit di lakukan oleh Dinas Sosial karena gelandangan dan pengemis menolak untuk di berikan pembinaan seperti diadakannya pelatihan dan keterampilan guna membina mereka agar bisa terdidik tanpa harus menjadi gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru.
3. Gelandangan dan pengemis (Gepeng) di Kota Pekanbaru terus meningkat setiap tahunnya, hal ini menyebabkan semakin banyaknya gepeng yang berasal dari daerah lain yang terus berdatangan membuat Dinas Sosial Kota Pekanbaru kesulitan dalam melakukan penanganan.

Dilihat dari masih banyaknya aksi gelandangan dan pengemis membuat peneliti tertarik untuk mengankat judul penelitian yaitu:

“ **Implementasi Peraturan daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru)”.**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang serta fenomena yang telah peneliti uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah " **Bagaimanakah Implementasi Peraturan daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru)"**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk menganalisis dan menjelaskan Implementasi Peraturan daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru).
b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru).

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis, Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang Administrasi Publik yang dipelajari dalam dunia perkuliahan.
b. Manfaat Praktis, sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi Dinas Sosial Kota Pekanbaru
c. Manfaat Akademis, sebagai referensi ilmu pengetahuan khususnya bagi peneliti selanjutnya dan umumnya bagi pembaca.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Studi Kepustakaan

Dalam menulis karya ilmiah atau suatu penelitian diperlukan adanya konsep landasan atau pedoman sebagai dasar untuk mengemukakan dan memahami permasalahan penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam sebuah penelitian. Selanjutnya dapat dilihat konsep teori yang berhubungan dengan penelitian ini dan akan diuraikan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini. Karena penelitian ini membahas tentang pemerintahan atau menyangkut tentang organisasi publik. Dan tentunya didalam sistem pemerinthan tidak terlepas dari yang namanya manajemen. Maajemen berkembang dan hidup layaknya sebuah sistem.

1. Konsep Administrasi

Menurut Siagian (dalam Wirman Syafitri 2012:9) administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama anatara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Silalahi administrasi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (dalam Zulkifli 2005:20)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berangkat dari teoritis batasan konsep administrasi baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas (keseluruhan proses kerjasama) menunjukkan adanya sejumlah aspek utama yang menjadi motor penggerak untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi oranisasi.

Pasolong (2007:3) mengatakan administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional.

Menurut Silalahi administrasi adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan menayagunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (dalam Zulkifli 2005:20).

Sedangkan menurut Sugandhga administrasi publik adalah sebuah proses kegiatan penetapan sasaran-sasaran serta pelaksaan tercapainya dengan memanfaatkan semua sumber yang tersedia guna mewujudkan tujuan negara yang dilakukan secara bekerjasama dengan melalui orang-orang, baik individu mapun kelompok secara terkoordinasi (dalam Amin Ibrahim, 2004:10)

Zulkifli terdapat tiga pengertian subtansial yang terkandung dalam sejumlah konsep administrasi yaitu:

1. Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni. Keberhasilan penerapannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisional. Administrasi sangat terikat kepada aspek kondisi, situasi, waktu dan tempat dimana dia jalankan.
2. Bahwa dalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur adanya dua orang manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tugas yang harus dilaksanakan, adanya perlengkapan dan peralatan untuk melaksanakan tugas, dan adanya pertimbangan rasionalitas dalam merumuskan dan menyediakan setiap unsur diatas.

3. Bahwa administrasi sebagai suatu proses kerjasama bukan merupakan konsep yang baru. Dia sudah ada dan dijalankan sejak manusia sudah mengenal peradaban. Tentang keberadaan administrasi sebagai suatu proses tindakan.

Administrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rsionalitas dan komitmen tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Bertitik tolak pada dasar teoritis batasan konsep administrasi menunjukkan bahwa adanya sejumlah unsur-unsur administrasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu, kelompok yang bekerjasama memerlukan seperangkat instrumen yang saking terkait dan bersinegri. Seperangkat instrumen tersebut berwujud sejumlah unsur yang mutlak harus ada. Artinya tanpa adanya unsur-unsur tersebut, tujuan yang telah ditetapkan atau yang dikehendaki tidak akan tercapai.

2. Konsep Administrasi Publik

Menurut Nigro adn Nigro administrasi publik aalah suatu tahapan maupun proses kerjasama pemerintahan yang terkait ketiga cabang pemerintahan yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif. Selanjutnya penegasan yang sama yang dikemukakan oleh Dimock dan Koening dalam pengertian secaraluas administrasi publik merupakan aktivitas ataupun kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan politiknya (dalam Mindarti, 2016:04).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Administrasi negara merupakan suatu tahapan ataupun proses yang melibatkan beberapa orang atau kelompok yang memiliki kecakapan maupun keahlian untuk melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Kemudian penyelenggaraan atas segenap kepentingan publik dan masalah publik yang ada pada suatu negara, merupakan ruang lingkup dari administrasi publik. Caiden (dalam Mindarti, 2016:04) administrasi publik merupakan keseluruhan aktivitas maupun kegiatan administrasi untuk segenap urusan publik (*administration for the publics affairs*).

3. Konsep Organisasi

Administrasi dan organisasi saling berkaitan satu dengan lainnya, untuk memenuhi kebutuhan yang ingin dicapai maka perlu adanya tempat (wadah) untuk bekerjasama dan tempat inilah yang dinamakan organisasi. Para sarjana ilmu administrasi semakin banyak memberikan perhatian kepada organisasi sebagai suatu proses meskipun perhatian terhadapnya sebagai wadah kegiatan kerja tetap penting. Sebagai suatu proses, organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif sekelompok orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu pendelegasian wewenang, pengawasan, dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksaan tugas.

Organisasi adalah kesatuan *(entity)* sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan (Robbins, 1990 : 4).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Siagian (dalam Zulkifli 2009 : 71) mendefinisikan organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan sesorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Sedangkan menurut Nawari (2008-13) mengatakan bahwa dalam organisasi terdapat unsur-unsur yang merupakan suatu kesatuan yang utuh agar sebuah organisasi dapat berjalan, adapun unsur-unsur pokok dalam sebuah organisasi:

1. Manusia, yaitu: yang terdiri dari dua orang atau lebih yang menghimpun diri dalam sebuah wadah.
2. Filsafat, yaitu: manusia yang menghimpun diri dalam organisasi dengan hakekat kemanusiaanya, menjalani kehidupan bersama berdasarkan filsafat yang sama.
3. Proses, yaitu: kerja sama dalam sebuah organisasi yang berlangsung secara berkelanjutan.
4. Tujuan, yaitu: organisasi didirikan manusia adalah oleh karena adanya kesamaan kepentingan, baik dalam rangka mewujudkan hakekat kemanusiaanya maupun secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhanya.
5. Banyak yang mendefinisikan pengorganisasian menurut siswanto mengtakan bahwa pengorganisasian adalah berdasarkan deskripsi tentang orgnisasi, pengorganisasian dalah pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kesatuan pekerjaan, penetapan hubungan antar pekerjaan yang efektif dianatara mereka, dan pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang wajar sehingga mereka bekerja secara efisien (Siswanto 2005:75).

Menurut Zulkifli (2005:131) yang mengatakan sebuah organisasi sebagai sistem apapun bentuk dan juga jenisnya adalah bersifat dinamis dan juga terbuka. Terbuka karena tidak mungkin menghindari dari berbagai bentuk pengaruh perubahan yang datang dari aspek lingkungan, terutama lingkungan eksternal.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dengan demikian untuk tetap bisa mempertahankan kelangsungan hidup sebuah oranisasi ditengah-tengah peribahan lingkungan agar tetap bisa eksis maka sebuah organisasi membutuhkan suatu strategi pengelolaan sumber daya ilmu yaitu manajemen. Jelaslah bahwa suatu organisasi tidak bisa bergerak sendiri, ia harus ada interaksi didalam dan keluar dalam pelaksaan fungsi dan tugas sehari-hari dengan saling mendukung antara satu sama lainya, baik antara orang-orang yang ada dalam organisasi maupun dengan organisasi lain atau instansi lain yang berada diluarnya.

4. Konsep Manajemen

Suatu organisasi jika ingin tetap berjalan lancar, maka memerlukan suatu ilmu dan strategi untuk mempertahankan serta menjalankan organisasi tersebut. Ilmu dan startegi tersebut terdapat dalam konsep manajeman. Dimana manajemen merupakan suatu usaha atau upaya pencapaian tujuan dengan mendayagunakan serta mengoptimalkan bantuan dan kemampuan orang lain untuk melakukan aktifitas pencapain tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Manajemen adalah proses dari perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengawasan pekerjaan anggota-anggota organisasi dan penggunaan semua sumber organisasi yang ada untuk mencapai tujuan organisasi (Stoner & Freeman dalam Donni J.Priansa & Agus Garnida, 2013).

Menurut Siagian (dalam Andry, 2015:12) manajemen didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujun melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kemudian menurut Sondang P. Hasibuan (dalam Samsudin 2010:17) mengemukakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur pemanfaatn sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Frans sadikin (dalam Samsudin, 2010:18) manajemen adalah proses untuk menciptakan, memelihara, dan mengoprasikan organisasi perusahaa dengan tujuan tertentu melalui upaya manusia yang sistematis, terkoordinasi, dan kooperatif. Proses penentuan asas-asas perusahaan yang menjadi batasan, pedoman, dan penggerak bagi setiap manusia dalam perusahaan sudah termasuk dalam pergantian manajemen.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen disebut sebagai ilmu dan ada juga yang menyebut manajemen sebagai seni. Dikatakan manajemen sebagai ilmu adalah suatu kumpulan pengetahuan yang logis dan sistematis. Manajemen sebagai seni adalah suatu kreatifitas pribadi yang disertai suatu keterampilan. Ilmu pengetahuan mengajarkan kepada orang tentang suatu pengetahuan tertentu, sedangkan seni mendorong orang untuk mempraktekkanya. Seni dalam manajemen meliputi kemampuan untuk memadukan suatu visi atau tujuan dengan keterampilan tertentu.

Dari alasan diperlakukannya manajemen diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen sangat dibutuhkan dalam berorganisasi termasuk pada Dinas Sosial Kota di Kota Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Konsep Kebijakan

Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan atau perumusan keputusan. Dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak menjadi sasaran kebijakan. Menurut Eulau dan Prewitt (1973 : 465) yang menyatakan kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness)* tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Selanjutnya Friedrich (1969: 80) kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan sebagai upaya yang selalu berhubungan dengan usaha untuk mencapai beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dicapai, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian terpenting dari definisi kebijakan milik Friedrich.

Menurut Dye (1992: 2) kebijakan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah (entah itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan sumberdaya manusia, menghentikan tindakan terorisme, ataupun lainnya) dan kerja tersebut menghasilkan sesuatu (*what difference it makes*) .

Selanjutnya Anderson (1984: 113) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan masalah. Anderson mengklasifikasi kebijakan, policy menjadi dua: substantif dan procedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tersebut diselenggarakan. Ini berarti, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembankan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerinah.

Menurut Dunn (2003: 105) perumusan kebijakan adalah suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam ranka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah:

1. Pengelolaan informasi, yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
2. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
3. Penerapan saran keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki badan/instansi tersebut bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
4. Penilaian terdapat isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembut kebijakan.

6. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah tindakan pmerintah yang berwenang. Menurut Young & Quin kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis, dan finansial untuk melakukannya (dalam Suharto, 2005:44). Lebih lanjut dijelaskan bahwa, kebijakan publik adalah seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebiaka publik biasanya bukanlah sebuah keputusa tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kemudian menurut Young dan Quinn (dalam Suharto, 2005:44) mengemukakan beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik sebagai berikut:

1. Tindakan pemerintah yang berwenang, kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata, kebijakan publik berupaya merespon masalah/kebutuhan konkrit yang berkembang dimasyrakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publil biasanya bukanlah sebuah keputusan tungal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang disebut untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Keputusan yang telah dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan suatu kebijakan yang telah dibuat, maka dibutuhkan strategi dan formulasi yang baik. Formulasi dari kebijakan publik adalah langkah awal dalam proses kebijakan publik yang sangat menentukan bagi implementasi kebijakan, menurut Person (dalam Dahlan 2004: 97). Secara metodologis klasifikasi pendekatan dalam formulasi kebijakan publik terdiri dari 5 (lima) pendekatan yaitu:

1. Pendekatan kekuasaan (*power approarch to policy*)
2. Pendekatan rasionalitas (*rationality and policy making*)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Kekuasaan dalam birokrasi (*public choice approach*)
4. Pembuat kebijakan (*personality*)
5. Proses pembuatan kebijakan (*formatio lochitian and processingin policy making).*

Untuk mengukur suatu keberhasilan suatu kebijakan tidak terlepas dari proses implementasinya. Implementasi kebijakan mengutip pendapat Meter dan Horn adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu dan kelompok-kelompok pemerintah dan swata yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran, yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan.

7. Konsep Implementasi

Hinggis (dalam Pasalong, 2007:57) mendefinisikan implementasi merupakan sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumberdaya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.

Menurut James Anderson (1979) menyatakan bahwa implementasi kebijakan/program merupakan bagian dari proses administrasi. Proses administrasi sebagaimana diistilahkan oleh anderson, digunakan untuk menujukkan desain atau pelaksanaan sistem administrasi yang terjadi pada saat in. Proses administrasi mempunyai konsekuensi terhadap pelaksanaan, isi dan dampak suatu kebijakan.

Sedangkan menurut Azam Awang (2010:32) Implementasi merupakan sebagai apa yang terjadi setelah peraturan perundang-undangan ditetapkan yang memberikan perioritas pada suatu program, manfaat atau suatu bentuk output yang jelas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Wahyu Nurharjadmo (2008:20) studi pelaksaan merupakan studi untuk mengetahui proses pelaksanaan, tujuan utama proses pelaksanaan itu sendiri untuk memberikan umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses pelaksanannya (dalam Deddy Mulyadi, 2016;50).

Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan keputusan kebijkan biasanya dalam bentuk undang-undang peraturan pemerintah, keputusan peradilan, pemerintah eksekutif atau dekrit presiden. Menurut Subarsono (2005:88) implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk mempengaruhi apa yang oleh lipsky disebut ‘‘streer level bureaucrats’ untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group).

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputsan tersebut mennjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah proram dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial.

Ripley dan Frangklin mengartikan implememtasi merupakan apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kebijakan keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible out put) (dalam Winarno 2007;145).

Dapat dikatakan Water Wiliam (dalam Ismail, 2007:132) implementasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasionalkan sebuah program dengan melalui tiga pilar sebagai berikut:

1. Organisasi: pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metoda untuk menjadikan program berjalan.
2. Interprestasi: menafsirkan agar program (seringkali dalam status0 menjadi rencana atau pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
3. Penerapan: ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan proram.

Menurut Azam (2010:32) implementasi diartikan sebagai pelaksanaan suatu keputusan politik yang biasanya disampaikan dalam bentuk peraturan perundangan, keputusan politik itu mencangkup masalah yang hendak diatasi, tujuan yang hendak dicapai serta untuk memecahkannya.

Tugas implementasi adalah sebagai penghubung yang memungkunkan tujuan-tujuan kebijakan publik menjadi hasil dari aktivitas pemerintah dan disamping itu juga implemtasi juga menyangkut masalah penciptaan suatu sistem penghantaran atau penyerahan kebijakan.

Menurut George C. Edward III (dalam Leo Agustino, 2014; 150-153) mengemukakan beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Komunikasi

   Komunikasi adalah penyampaian informasi, ide-ide terhadap para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di salurkan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi disortasi implementasi. Keberhasilan implementasi kebijakan terjadi jika komunikasi setiap organisasi itu terjalin dengan baik. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh 3 indikator, yaitu: penyaaluran komunikasi, konsistensi komunikasi, kejelasan komunikasi.

2. Sumber Daya

   Sumber Daya adalah, ketersediaan dalam sumber daya pendukung sangat di butuhkan dalam implementasi. Kekurangan sumber daya dalam melaksanakan kebijakan, implementasi tidak dapat berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, informasi, sarana dan prasaran.

3. Disposisi

   Disposisi adalah karakteristik dan watak dari implementor itulah yang disebut disposisi. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

   struktur birokrasi berkaitan dengan kesesuaian organisasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan. Strktur birokrasi menjelaskan susunan tugas maupun SOP (Standard operating Prosedur) dan juga pembagian kerja.

Empat variabel ini dikembangkan untuk mementukan keberhasilan implementasi, menunjukkan adanya pengaruh sikap para pembuatan kebijakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sendiri, tetapi juga ada unsur yang eksternal yang masih melihat kehendak kelompok sasaran.

8. Konsep Penanganan

Menurut KKBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) penanganan diartikan sebagai perbuatan menangani ataupun penggarapan. Program pemerintah dalam penanganan dan gelandangan dan pengemis merupakan program yang mendukung pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan. Penanganan berarti kegiatan yang bertujuan agar tidak terjadi pergelandangan dan pengemisan dan mencegah meluasnya pengaruh yang diakibatkan didalam masyarakat, serta memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri.

Penanganan gelandangan dan pengemis ini bertujuan untuk :

a. Mencegah dan mengantisipasi bertambah suburnya gelandangan dan pengemis.
b. Mendidik dan memberdayakan gelandangan dan pengemis untuk dapat hidup secara layak.
c. Meningkatkan peran serta pemerintah daerah, dunia usaha, penegak hukum, pendidikan, keagamaan dan elemen masyarakat lainnya unuk berpartisipasi dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis.

Penanganan gelandangan dan pengemis, dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia yan berbudaya, beragama, berazazkan pancasila. Dalam Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Kasus Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Artidjo Alkostar (1983:118) dalam penanganan gelandangan dan pengemis melalui program kebijakan ada beberapa alternatif yang harus diperhatikan agar kebijakan dapat berjalan antara lain :

1. Harus dilakukan seirama dengan proses perkembangan kepribadian manusia.
2. Proses perubahan yang terjadi secara tidak sadar dalam pengalaman.
3. Aspek integrativ totalitas pribadi diganti unsur-unsur baru yang berpengaruh secara integrativ di masukkan. Totalitas lama dihancurkan dibangun totalitas baru.

   Merubah karakter seseorang dengan kehidupan yang berbeda atau yang baru khususnya permasalahan gelandangan dan pengemis memerlukan pendekatan yang spesifik.

9. Konsep Gelandangan dan Pengemis

a. Pengertian Gelandangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian sebagai berikut menurut Poerwadarminta, yaitu berjalan kesana kesini tidak tentu tujuannya. Berkeliaran: bertualangan atau orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaanya. Menurut Poerwadarminta (1990:261) gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma dan kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat. Serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasiahan dari orang lain.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pasal 1 Peraturann Pemerintah Republik Indonesia No 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis yang berbunyi:

Gelandangan adalah orang yang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma dan kehidupan yang layak dalam masyarakat setemepat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Humaidi, (2003:28) menyatakan bahwa gelandangan berasal dari kata gelandangan yang berarti yang selalu mengembara atau berkelana. Menurut Sarlito W. Sarwano, gelandangan adalah oran-orang miskin yang hidup di kota-kota yang tidak mempunyai tempat tinggal tertentu yang sah menurut hukum. Orang-orang ini menjadi beban pemerintah kota karena mereka ikut menyedot dan memanfaatkan fasilitas perkotaan. Tetapi tidak membayar kembali fasilitas yang mereka nikmati itu. Tidak membayar pajak misalnya (Sarlito W. Sarwono. 2002 : 49). Pengertian gelandangan menurut Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial adalah Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap dan mengembara di tempat umum.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Pengertian Pengemis

Pengertian pengemis menurut Perda No 12 Tahun 2008 adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang. Keith Hart (2000) mengemukakakn bahwa dari kesempatan memperoleh penghasilan yang sah. Pengemis dan gelandangan termasuk pekerja sektor informal.

Menurut Dimas Dwi Irawan, khusus untuk kata pengemis lazim digunakan untuk sebutan bagi orang yang membutuhkan uang, makam, tempat tinggal, atau hal lainnya dari orang yang di temuinya dengan cara meminta. Berbagai atribut mereka gunakan, seperti pakaian compang-campig dan lusuh, topi gelas pelastik, atau bungkus permen, atau kotak kecil unyuk menempatkan uang yang mereka dapatkan dari meninta-minta. Merka menjadikan pengemis sebagai pekerjaan meraka dengan berbagai macam alasan. Seperti kemiskinan dan ketidak berdayaan mereka karena lapangan kerja yang sempit.

10. Konsep Kemiskinan

Secara etimologis**, "**Kemiskinan" berasal dari kata "Miskin" yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departemen sosial dan Badan Pusat Statistika mendefinisikan kemiskinan dari perspektif kebutuhan dasar. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002). Lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan kondisi yang berada dibawah garis nilai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non-makanan yang disebut garis kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan (poverty treshold).

Permasalahan kemiskinan untuk saat ini masih menjadi persoalan utama bagi Indonesia, walaupun dialami juga oleh hampir semua negara yang berkembag di dunia. Kemiskinan menimbulkan berbagai permasalahan kemiskinan menjadi sumber dari banyak permasalahan sosial lainnya seperti, kriminalitas, pengangguran, kebodohan, tingkat kesehatan yang rendah, dan lain-lain.

Kemiskinankultur disebabkan adanya faktor-faktor budaya suatu daerah sehingga seseorang tetap miskin, sedangkan kemiskinan struktural disebabkan ketidak berdayaan seseorang terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil. Kemiskinan struktural terjadi karena orang atau sekelompok orang tidak memiliki daya tawar yang kuat terhadap sistem atau tatanan sosial yang ada, serta tidak adanya akses untuk dapat membebaskan diri dari belenggu tersebut (BPS, 2009).

Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan disuatu wilayah tersebut. Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyrakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga tetdapat masyrakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Kerangka Pikir

Dalam hal ini, berdasarkan variabel penelitian ini yaitu "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru)", maka penulis menguraikan alur kerangka pemikiran dengan mendudukan 4 indikator yang ada menurut George C. Edward III Peneliti mengambil keempat indikator tersebut sebagai indikator yang dijadikan ukuran dalam usulan penelitian ini.

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru.)



Sumber: Hasil Modifikasi Penulis, 2019.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Konsep Operasional

Untuk memudahkan pemberian pemahaman dalam menafsirkan istilah atau pun konsep terkait usulan penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini :

a. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas dan komitmen tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
b. Organisasi adalah wadah untuk memfasilitasi proses kerja sama untuk pencapaian suatu tujuan tertentu.
c. Manajemen adalah seni untuk memengaruhi orang lain agr mau melakukan sesuatu tanpa merasa terpaksa atau dengan senggang hati.
d. Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru merupakan sebuah upaya yang digadang-gadangkan untuk mampu membrantas atau menghilangkan gelandangan dan pengemis,
e. Dalam implementasi menurut George C. Edward III yang mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah :
    1. Komunikasi.

       Komunikasi adalah penyampaian informasi, ide-ide terhadap para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di salurkan kepada kelompok sasaran *(target group)* sehingga akan mengurangi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

disortasi implementasi. Keberhasilan implementasi kebijakan terjadi jika komunikasi setiap organisasi itu terjalin dengan baik. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh 3 indikator, yaitu: penyaaluran komunikasi, konsistensi komunikasi, kejelasan komunikasi

2. Sumber Daya, ketersediaan dalam sumber daya pendukung sangat di butuhkan dalam implementasi. Kekurangan sumber daya dalam melaksanakan kebijakan, implementasi tidak dapat berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, informasi, sarana dan prasaran.
3. Disposisi, karakteristik dan watak dari implementor itulah yang disebut disposisi. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan.
4. Struktur Organisasi, struktur birokrasi berkaitan dengan kesesuaian organisasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan. Strktur birokrasi menjelaskan susunan tugas maupun SOP (Standard operating Prosedur) dan pembagian kerja.

f. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma dan kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

g. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang.

D. Operasional Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, indikator, item penilaian, dan skala yang direncanakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Tujuan operasional variabel ini adalah menjelaskan mengenai konsep-konsep utama dalam penelitian ini dan pengelompokkan item penelitian yang sama sebagai variabel penelitian adalah "Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru", yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.1 : Operasional Variabel Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Model implementasi kebijakan George C. Edward III (Leo Agustino, 2014; 150-153)	Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kota	1. Komunikasi	a. Memberikan informasi b. Mengadakan sosialisasi
		2. Sumber Daya	a. Tersedianya sumber daya manusia b. Sarana dan prasarana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

	Pekanbaru	3. Disposisi	a. Keseriusan dalam menjalankan kebijakan. b. Langkah yang dilakukan dalam melaksanakan kebijakan.
		4. Struktur Birokrasi	a. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. b. Pembagian tugas yang terstruktur dan memiliki fungsi masing-masing yang saling melengkapi

Sumber: Modifikasi Peneliti, 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

METOE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe kualitatif, dengan analisa deskriptif. Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan menjelaskan bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru. Karena peneliti bermaksud memberikan hasil analisa dan informasi yang detail terhadap obejek penelitian, sehingga akan ditemukan kejadian-kejadian relative dan diperoleh gambaran yang sangat jelas dari hasil analisanya.

Tipe penelitian kualitatif digunakan karena dapat menghasilkan data dengan akurat dan terperinci. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, actual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama (Sugiyono, 2014:7). Serta dinamakan postposivitik karena berlandaskan pada filsafat postpositive.

Metode ini juga disebut sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpreventive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap yang ditemukan dilapangan. Metode penelitian kualitatif juga sering disebut metode

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting).

Selanjutnya sebagai alat untuk mendapatkan informasi adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data dan informasi yang diperoleh akan dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis dan menjelaskan Strategi Dinas Sosial Dalam Mengatasi Masalah Pengamen Di Kota Pekanbaru.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, peneliti mengambil penelitian pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang berada di Jalan Datuk Setia Maharaja, Tengkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Adapun alasan peneliti memilih untuk melakukan penelitian ditempat ini dikarenakan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik karena masih adanya gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di Kota Pekanbaru sesuai dengan fenomena yang penulis temukan dilapangan.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang baik serta keterangan-keterangan dan data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan hasil pengamatan penelitian yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapai atau diperoleh melalui kegiatan peneliti turun langsung kelapangan / lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu mengenai Strategi Dinas Sosial Dalam Mengatasi Masalah Pengamen Di Kota Pekanbaru.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data dan informasi serta keterangan yang relevan dari organisasi yang berhubungan langsung dengan penelitian ini yaitu Kantor Dinas Sosial Pekanbaru. Data sekunder ini diperoleh berupa dokumen resmi yang diberikan oleh pegawai Dinas Sosial seperti arsip literature berupa struktur organisasi, SOP, maupun informasi atau keterangan yang telah dipublikasikan/ditempelkan di papan/dinding informasi di Kantor Dinas Sosial Pekanbaru.

D. Informan dan Key Informan Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Arikunto (2006:145) subjek penelitian adalah objek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Subjek penelitian merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkapkan fakta-fakta di lapangan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Penentuan subjek penelitian atau responden dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling. Purposive sampling menurut Djaman Satori (2007:6) teknik pengambilan sampel yang ditentukan dengan menyeseuaikan pada tujuan penelitian atau pertimbangan tertentu. Penelitian ini mengambil siapa saja yang menurut pertimbangan tertentu. Penelitian ini mengambil siapa saja yang menurut pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

Tabel 3.1: Informan dan Key Informan Penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Studi Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru.

NO	Responden Penelitian	Informan	Key Informan
1.	Kepala Dinas Sosial	-	1
2.	Kabid Rehabilitasi Sosial	-	1
3.	Kepala Satpol PP	-	1
4.	Bidang Ketertiban Umum	-	1
5.	Gelandang dan Pengemis	2	-
6.	Masyarakat yang masuk dalam ruang lingkup operasi Gelandangan dan Pengemis	5	-
7.	Masyarakat pengguna jalan yang melintasi lokasi operasi gelandangan dan pengemis	5	-
Jumlah		12	4

Sumber Data Penelitian, 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpuulkan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Dimana teknik ini menurut Sugiono (2012:241) diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Observasi

   Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Sehingga data yang dikumpulkan lebih lengkap.

2. Wawancara (Interview)

   Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab oleh peneliti kepada responden. Teknik ini dilakukan agar informasi yang didapatkan oleh peneliti lebih abash, jelas dan akurat serta actual. Dan kemudian teknik ini juga sangat bermanfaat jika diterapkan pada informan atau responden yang dianggap banyak tahu tentang apa yang sedang diteliti oleh peneliti.

3. Dokumentasi

   Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah momen baik foto, video, maupun rekaman atau media lain dari responden yang bersangkutan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan dianalisis secara deskriptif, yaitu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta dilapangan dan hasilnya akan disajikan dan dilengkapi denan uraian-uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat ditarik kesimpulan.

Usaha mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap dalam aspek yang diamati dan diselidiki agar jelas keadaan kondisi sebenarnya. Penemuan fenomena dan gejala-gejala itu berarti tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk juga usaha menemukan hubungan satu dengan yang lainnya didalam aspek yang diteliti.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Waktu dan jadwal penelitian ini berlangsung di Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel III.II : Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Implementasi Peraturan daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru)

NO	JenisKegiatan	Bulan dan Minggu Ke																					
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Penyusunan UP																						
2	Seminar UP																						
3	Revisi UP																						
4	Revisi Daftar Wawancara																						
5	Rekomendasi Survey																						
6	Survey Lapangan																						
7	Analisis Data																						
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																						
9	Konsultasi Revisi Skripsi																						
10	Ujian Konferehensif Skripsi																						
11	Revisi Skripsi																						
12	Penggandaan Skripsi																						

Sumber : modifikasi penulis, 2020

H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian ini dibhas dalam bab 6 bab, dimana pada masing-masing pembahasan bab tersebut saling berkaitan anatara bab yang satu dan bab yang lainnya yaitu:

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Pada bab ini berisikan penguraian dari pengertian, definisi konsep dan teori-teori yang menyagkut daftar pustaka, kerangka pikir, konsep operasional, operasional variabel, serta teknik pengukuran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini berisikan tentang tipe penelitian, lokasi penelitian, teknik pengukuran sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, dan jadwal waktu kegiatan penelitian.

BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai deskripsi atau gambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas permasalahan yang akan penulis teliti mengenai Implementasi Peraturan daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Kasus dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis Kota Pekanbaru).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian kesimpulan yang menyimpulkan hasil penelitian yang penulis tentukan kemudian diberikan saran atau temuan peneliti.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

1. Keberadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu Daerah yang berada di Provinsi Riau yang menyandang predikat sebagai Ibu Kota Provinsi Riau. Sehingga dengan demikian Kota Pekanbaru adalah salah satu kegiatan perekonomian dan administrasi Provinsi Riau. Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau dengan luas sekitar 632.26 Km² dan secara astronomis terletak diantara 0º 25'- 0º 45' Lintang Utara dan 101º 14 - 101º 34' Bujur Timur. Dengan batas-batas Wilayah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- Di bagaian Utara Kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak
- Di bagian Timur Kota Pekanbaru berbatsan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Di bagian Selatan Kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar
- Sedangkan di bagian Barat Kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 bahwa Daerah Kota Pekanbaru di perluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km² yang terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan. Dari hasil pengukuran/ pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km² dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkat.

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang saat itu di pimpin oleh seseorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di Muara Sungai Siak.

Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbarui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) di mana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang luas. Diantaranya pembebasan Cukai dan Monopoli terhadap beberapa jenis dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan sangat penting. Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian Kapal-kapal Belanda, selanjutnya Pelayaran Ke Petapahan dilanjutkan dengan Perahu-perahu Kecil. Dengan kondisi ini, Payung sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukkan sebagai Komodotif perdagangan baik dari luar untuk diangkut kepedalaman maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti Timah, Emas, Barang kerajinan Kayu dan hasil Hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondidi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memegang posisi Silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minang Kabau dan Kampar. Hal ini juga merancang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting bagi para pengusaha pada zaman itu.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Amaludin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana dikampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat Pekan atau Pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh Putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultah Muhammad Ali Abdul Jalil Muazam Syah meskinpun lokasi pasar bergeser disekitar pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Iman Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebuat Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazam Syah dibawah Pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazam Syah, penguasaan Senapelan di serahkan kepada Datuk Bandar dan dibantu oleh Empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir, dan Datuk kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi datuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggung jawab kepada Sultan Siak dan jalanya Pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjunya perkembangan tentang Pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan:

SK Kerajaan Bershuit Van Inlandsch Zelfbestuur Van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.

1. Tahun 1932 Pekanbaru masuk Wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.
2. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seseorang Gubernur Militer Go Kung, District menjadi UGM yang di kepalai oleh Gunco.
3. Ketetapan Gubernur Sumatra di Medan tanggal 17 mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte.
4. UU No. 22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kambar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
5. UU No. 8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
6. UU No. 1 tahun 1956 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
7. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibu Kota Pekanbaru Riau.
8. UU No. 8 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
9. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dengan meningkatkan kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntunan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya.

Untuk lebih terciptanya tertip pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa Baru dengan Perda Baru tahun 2003 menjadi 58 Keluarah/Desa. Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari Barat Ke Timur. Memiliki anak sungai diantara lain: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga Merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke Kota serta dari daerah lainnya.

Keadaan iklim Kota Pekanbaru pada umumnya, beriklim Tropis dengan suhu Udara maksimal berkisar antara 34,1 derajat celcius sampai dengan 35,6 derajat celcius dan suhu minimum antara 20,2 derajat celcius sampai dengan 23,0 derajat celcius. Curah hujan antara 38,6 sampai dengan 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar dimusim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember sementara itu untuk musim kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan Kota berkembang sehingga menjadi salah satu Kota tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di Kota Pekanbaru. Seiring semangkin banyaknya warga pendatang untuk menetap di Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari pendapatan warga, penataan rumah penduduk, penyediaan lahan pekerjaan serta penyediaan sarana dan prasarana baik di sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor ibadah, dan fasilitas umum lainnya. sehingga kesejahteraan penduduk Kota Pekanbaru tetap terjamin dan sejahtera terkait fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah Kota Pekanbaru adalah Suku Melayu, namun demikian juga terdapat Suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang kedaerah ini seperti Suku Minang, Jawa, Batak, dan sebagainnya. Mata pencarian Penduduk Kota Pekanbaru adalah Pegawai Pemerintah, Pegawai Swasta serta Pedagang. Berikut ini merupakan jumlah Distribusi data mengenai data penduduk menurut jenis kelamin didua belas Kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan, dan Kecamatan Rumbai Pesisir di Kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan Di Kota Pekanbaru Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan Di Kota Pekanbaru		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tampan	146.960	138.972	285.932
2.	Payung Sekaki	46.476	44.426	90.902
3.	Bukit Raya	53.757	49.965	103.722
4.	Marpoyan Damai	68.104	63.258	131.362
5.	Tenayan Raya	83.837	78.693	162.530
6.	Limapuluh	21.138	21.331	42.469
7.	Sail	10.994	11.021	22.015
8.	Pekanbaru Kota	13.032	12.687	25.719
9.	Sukajadi	24.115	24.429	48.544
10.	Senapelan	18.590	18.869	37.459
11.	Rumai	35.370	32.200	67.570
12.	Rumai Pesisir	37.544	35.320	72.864
Total		559.917	531.171	1.091.088

Sumber: Badan Statistik Kota Pekanbaru 2020

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk Di Kota Pekanbaru pada tahun 2020 sebanyak 1.091.088 yang terdiri dari 12 Kecamatan yang ada di Kota

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pekanbaru, dan berikut ini jumlah data penduduk menurut kelompok umur yang ada di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Menurut Umur Berdasarkan Kecamatan Di Kota Pekanbaru Tahun 2020

No	**Kelompok Umur**	**Jumlah Pendudukan Menurut Umur Berdasarkan Kecamatan Di Kota Pekanbaru**		
		Laki-laki	**Perempuan**	**Jumlah**
1.	0-4	57.467	52.551	110.018
2.	5-9	50.281	46.149	96.430
3.	10-14	45.936	42.572	88.513
4.	15-19	51.290	52.497	103.787
5.	20-24	62.368	61.252	123.620
6.	25-29	53.560	50.689	104.249
7.	30-34	47.116	45.895	93.001
8.	35-39	44.801	43.317	88.118
9.	40-44	41.152	38.297	79.449
10.	45-49	34.885	30.560	65.445
11.	50-54	26.061	23.175	49.239
12.	55-59	18.971	17.780	36.751
13.	60-64	11.895	10.464	22.359
14.	65+	14.134	15.968	30.102
Total		559.917	531.171	1.091.088

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sumber: Badan Statistik Kota Pekanbaru 2020

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk yang paling banyak berada pada umur 20-24 tahun yaitu sebanyak 123.620 jiwa dan jumlah penduduk yang paling banyak berikutnya terdapat pada umur 0-4 tahun yaitu sebanyak 110.018 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat pada umur 60-64 tahun yaitu sebanyak 22.359 jiwa pada tahun 2020.

3. Pemerintah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang Walikota yang diangkat oleh Gubernur. Penyelenggaraan roda Pemerintahan Kota Pekanbaru dipusatkan pada Kantor Walikota Pekanbaru, susunan organisasi Pemerintahan dan Pelayanan kepada Masyarakat di Kota Pekanbaru terdiri dari unsur Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris walikota dan masing-masing Kepala Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pembangunan dan Kelompok jabatan Fungsional.

Kota Pekanbaru memiliki 12 Kecamatan, lima puluh delapan Kelurahan serta Enam ratus delapan puluh RW dan dua ribu delapan ratus lima puluh RT yang ada di Kota Pekanbaru, adapun nama Kecamatan dan Keluarahan yang ada di Kota Pekanbaru yaitu Kecamatan Tampan yang terdiri dari Empat Kelurahan yaitu Kelurah Simpang Baru, Kelurahan Sidomulya Barat, Kelurahan Tua Karya, dan Kelurahan Delima. Kecamatan Payung Sekaki yang terdiri dari Empat Kelurahan yaitu Kelurahan Labuh Baru Timur, Kelurahan Tampan, Kelurahan Air Itam, Kelurahan Labu Barat. Kecamatan Bukit Raya yang terdiri dari Empat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kelurahan yaitu Kelurahan Simpang Tiga, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kelurahan Tangkeran Utara, dan Kelurahan Tangkerang Labuai. Kecamatan Marpoyan Damai yang terdiri dari Lima Kelurahan yaitu Kelurahan Tangkerang Tengah, Kelurahan Tangkerang Barat, Kelurahan Maha Ratu, Kelurahan Rejosari, dan Kelurahan Sail. Kecamatan Sail yang memiliki Tiga Kelurahan yaitu Kelurahan Cita Raya, Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Sukamulya. Kecamatan Sukajadi terdiri dari Tujuh Kelurahan yaitu Kelurahan Kampung Tengah, Kelurahan Kampung Melayu, Kelurahan Kendung Sari, Kelurahan Harjosari, Kelurahan Sukajadi, dan Kelurahan Pulau Karam. Kecamatan Rumbai yang terdiri dari Lima Kelurahan yaitu Kelurahan Lembun Sari, Kelurahan Muara Fajar, Kelurahan Rumbai Bukit, Kelurahan Palas, dan Kelurahan Sri Meranti. Kecamatan Lima Puluh yang terdiri dari Empat Kelurahan yaitu Kelurahan Rintis, Kelurahan Sekip, Kelurahan Tanjung Rhu, dan Kelurahan Pesisir.

Kecamatan Pekanbaru Kota terdiri dari enam Kelurahan yaitu Kelurahan Simpang tiga, Kelurahan Sumahilang, Kelurahan Tanah Datar, Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Suka Ramai, dan Kelurahan Kota Tinggi. Kecamatan Rumbai Pesisir yang terdiri dari Enam Kelurahan yaitu Kelurahan Meranti Pendek, Kelurahan Limbungan, Kelurahan Lembah Sari, Kelurahan Limbungan Baru, dan Kelurahan Tebing Tinggi Okura.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti Indonesia telah merdeka seuutuhnya dan merasa aman dari penjajahan Belanda ternyata tidak ingin melepas begitu saja jajahannya meski Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan. Dengan maksi ingin menjajah kembali Indonesia maka belanda dengan kekuatan penuh pasukan tempurnya kembali ingin menguasi Indonesia. Pejuang Indonesia sedikitpun tak bergeming dengan gertakan Belanda, malah kembali menggertak Belanda dengan semboyan merdeka atau mati.

Terjadi pertempuran yang sangat sengit anatara dua bangsa yang berbeda tujuan dan keinginan telah terjadi peristiwa yang sangat heroic, dimana pejuang Indonesia rela mati demi mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diproklamirkannya,sementara penjajah Belanda yang selama ini telah mendapat keuntungan dan kekayaan yang melimpah dari bumi Indonesia tidak rela melepas begitu saja, maka terjadilah pertempuran yang luar biasa dahsyat, peristiwa itu terjadi antara tahun 1947-1950.

Dampak peristiwa ini menumbuhkan perasaan hubungan yang emosional dan persaudaraan yang kenatal antara pejuang, pengungsi, relawan dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pertempuran tersebut. Peristiwa ini kemudian disebuat hari kesetiakawanan sosial yang jatuh pada tanggal 22 Desember 1947 yang cikal bakal lahirnya Depertemen Sosial. Hingga kini pemerintah Negara

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Republik Indonesia setiap tanggal 22 Desemeber diperingati sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) atau hari jadi Departemen Sosial.

Pada tahun 1948 pemerintah Negara Republik Indonesia yang baru berdiri dan sedang dilanda perang merasakan perlunya suatu Instansi yang sah yang dikelola oleh pemerintah dalam rangka membantu peperangan, maka pada tahun itu dibentuklah yang namanya Inspeksi Sosial muali dari pusat sampai kedaerah-daerah yang tugas pokoknya adalah membantu tentara Republik Indonesia dalam peperangan.

Pada tahun 1950 Inspeksi Sosial ditukar menjadi Jawatan Sosial yang tugas pokoknya adalah membatu korban perang para veteran pejuang, kemudian pada tahun 1965 Jawatan Sosial yang tugas utamanya adalah membantu para korban perang dan veteran pejuang ditambah tugas pokoknya dengan membantu para penyandang cacat, Tenaga Kerja Indonesia, dan Organisasi Sosial (orsos). Pada tahun 1974 Jawatan Sosial diganti nama menjadi Departemen Sosial Republik Indonesia, untuk tingkat provinsi disebut Kantor Wilayah (kanwil) Departemen Sosial Provinsi yang di kepalai oleh seorang kepala Departemen, sementara untuk tingkat Kabupaten/Kota disebut kantor Departemen sosial kabupaten/kota, untuk tingkat kecamatan disebut petugas Sosial kecamatan yang berkantor di kantor camat setempa. Pada tahun 1998, Departemen Sosial pernah dibubarkan oleh Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu di jabat oleh KH. Abdurrahman Wahid atau Gusdur, dengan alasan yang tidak jelas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pada tahun 1999, dihidupkan kembali Departemen Sosial dengan bergabti nama Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN) untuk tingkat pusat. Kemuian pada tahun 2000 diganti kembali dengan nama Depertemen Sosial dan Kesehatan Republik Indonesia. Pada tahun 2001 Departemen Sosial Republik Indonesia dihidupkan kembali oleh presiden yang pada waktu itu dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. Pada tahun itu juga untuk Kota Pekanbaru sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, maka terbentuklah Dinas Sosial dan 39 Pemakaman Kota Pekanbaru, berdasarka Peraturan Pemerintah Kota Nomor 07 tahun 2001.

Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Dinas sosial kota Pekanbaru adalah unsure pelaksana pemerintah daerah dibidang kesejahteraan sosial dan yang pada saat ini di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang terdiri dari 1 orang, sekretaris 3 orang, Kepala Bidang (kabid) 3 orang, 9 Kepala Seksi dan tenaga jabatan fungsional lainnya. disamping itu Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga mempunyai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.

C. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Struktur organisasi merupakan suatu sistem pembagian tanggung jawab, wewenang serta penetapan hubungan antara unsur-unsur organisasi dalam pencapain tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan ini hendaknya dicapai semaksimal mungkin dengan menggunakan potensi-potensi yang dimiliki

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

walaupun potensi tersebut terbatas. Berikut ini satruktur organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai beriku:

Tujuan:

a) Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial bagi PMKS guna memulihkan dan meningkatka fungsi sosial dalam mencapai kemandirian.
b) Meningkatkan kapasitas dan partisipasi potensi sumber kesejahetraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sasaran

a) Meningkatnya pelayanan dan penanggulangan PMKS
b) Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berintegritas serta tumbuh kembangnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat.
c) Mewujudkan reformasi birokrasi
d) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Sedangkan Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Visi

   " Terwujudnya kesejahteraan sosial masyrakat, melembaganya semangat kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial, serta pemantapan aparatur".

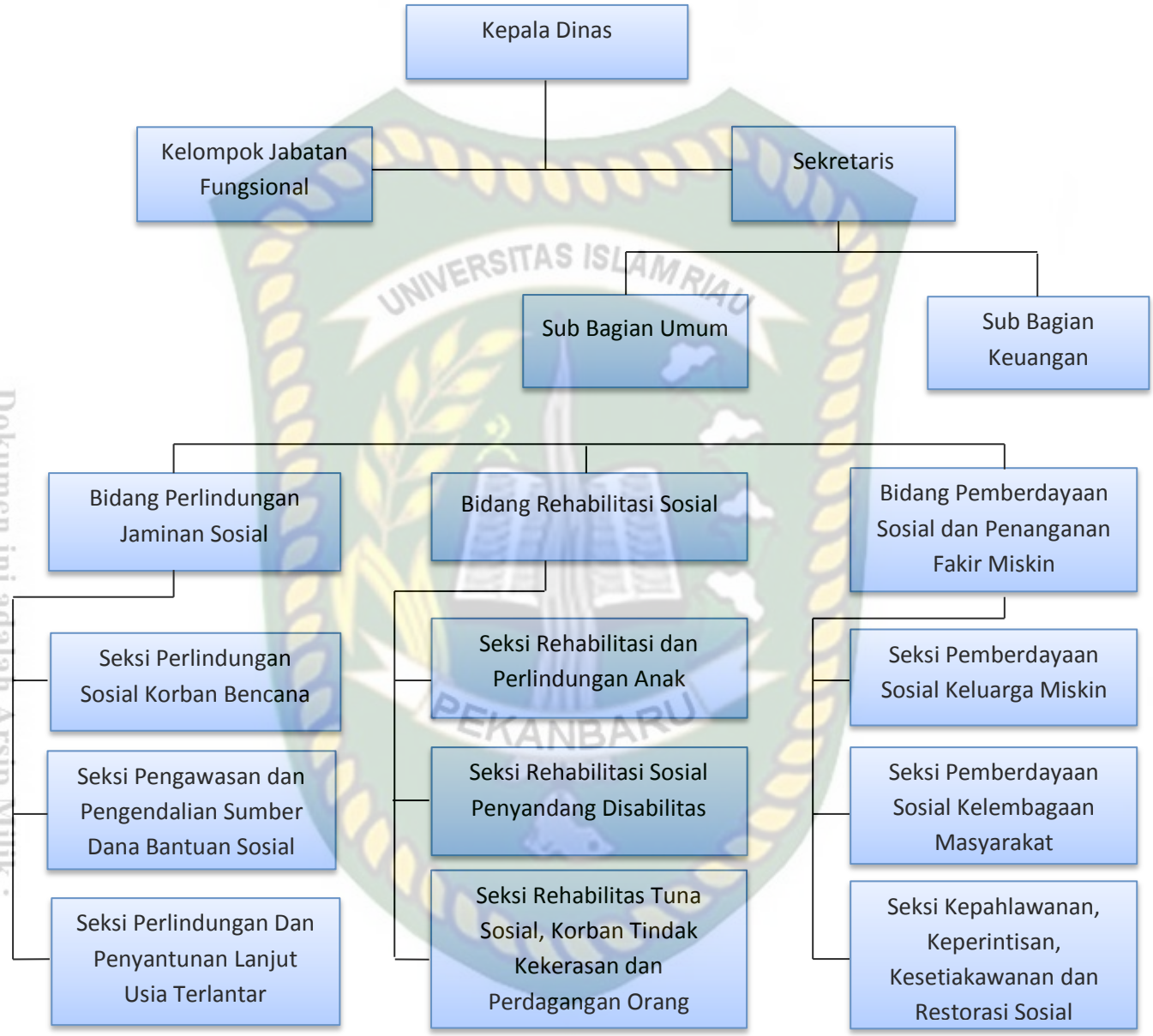
2. Misi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertaqwa, Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi.
b. Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana kerja
c. Mensosialisasikan bantuan kesejahteraan sosial
d. Mengembangkan/ meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyrakat serta memberdayakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial secara optimal dalam pembangunan kesejahteraan sosial
e. Mewujudkan pemakaman yang indah dan tertib.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru



Sumber : Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Kepala Dinas

   Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas:

   a. Merumuskan kebijakan teknis dalambidang sosial
   b. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang sosial
   c. Membina dan melaksanakan urusan bidang sosial
   d. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial
   e. Membina unit pelaksanaan Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
   f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

   Sekretaris mempunyai tugas:

   a. Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuanganan dan menyusun program dinas
   b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan
   c. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan program kerja tahunan dilingkungan dinas
   d. Mewakili Kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat
   e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian
   f. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

g. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban dinas
h. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor
i. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing
j. Mengevaluasi tugas sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
k. Melaporkan pelaksanaan tugas sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis
l. Memfasilitasi dan asistensi tugas sekretariat dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis
m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas:

a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan baha penyususnan rencana dan program perlindingan sosial, bantuan jaminan sosial, advokasi sosial
b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembinaan, pemberian bantuan perlindingan sosial terhadap korban bencana alam, bencana sosial, kerusuhan massa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengendalian dan pengawasan pengumpulan bantuan sosial
d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan Perlindungan dan Penyatunan Lanjut Terlantar
e. Mengkordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan unut kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas
f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas
g. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas:

a. Mengkoordinasi, membina dan merumus penyiapan bahan perlaksanaan pembinaan dan bimbingan rehabilitasi sosial
b. Mengkoordinasi, pembina dan merumuskan pelaksanaan pembinaan lanjut, pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial anak terlantar, anak bermasalah dengan hukum, anak dengan kedisabilitasan, anak korban tindak kekerasan/diperlakukan salah, anak jalanan, balita terlantar, eks korban napza, tuna sosial, kaum minoritas, penyandang psikotik.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan menyusun laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas
d. Mengkoordinasi, membina, merumuskan memberi petunjuk teknis pelaksanaan tugas kerja bawahan
e. Mengkoordinaskan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pemimpin
f. Mengkoordinasi, menyusun dan merumuskan rencana kegiatan bidang.
g. Melaksakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas:

a. Penyusnan program kerja
b. Pembinaan dan perumusan bimbingan teknis dan pengendalian program pemberdayaan sosial dan penagnagan fakir miskin
c. Pengkoordinasian inventarisasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) di bidang tugasnya.
d. Pengkoordinasian dan perumusan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan restorasi sosial
e. Pengumpulan bahan kegiatan penyulihan
f. Pelaksanaan tugas tugas lain.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan polisi pamong praja yang disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan daerah.satutan polisi pamong praja dapat berkedudukan di daerah provinsi dan Kabupaten/Kota. Di daerah provinsi, Satutan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah Kabupaten/Kota, satuan polisi pamong praja di pimpin oleh kepala satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Polisi pamong praja didirikan didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto Praja Wibawa, yang berfungsi untuk mewadahi sebagaian tugas pemerintah daerah. Sebelum menjadi satuan polisi pamong praja pada masa setelah proklamasi kemerdekaan dimana sempat diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, maka pada masa itu di bentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1958, lembaga ini berubah nama menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pada tahun 1960 dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Daerah Jawa dan Madura dengan dukungan para petinggi militer. Pada tahun 1962 namanya kembali

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari Korps Kepolisian Negara seperti yang dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 1961 Tentang Pokok-pokok Kepolisian. Namun pada tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja, namun selanjutnya istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mulai dikenal sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Namun saat ini UU No. 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian di revisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 148 UU No.32 Tahun 2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dengan tugas pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentuan masyarakat sebagai pelaksanaan tugas Desentralisasi sebagai tindak lanjut dari UU No.32 tahun 2004 tersebut, Pemerintah Provinsi Riau membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 34 tahun 2001 tanggal 26 April 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2001 Nomor : 38 tanggal 28 April 2001. Untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 8 Tahun 2008 yang mana menyebutkan dengan jelas bahwa tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khusunya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang dahulunya berada pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau sekarang sudah menjadi tugas pokok satuan polisi pamong praja Provinsi Riau. Selain itu satuan polisi pamong praja juga bertugas untuk penertiban pelaksanaan dan pengawasan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Maka mulai sejak itulah dibentuk pula satuan polisi pamong praja di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Visi Dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kota Pekanbaru Yang Tentram, Tertib Dan Taat Hukum.

Dalam pernyataan Visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut:

1. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamain rasa aman dan tentram.
2. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertera dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
3. Tata hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan, adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

Misi: Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Susunan Organisasi

Satuan polisi pamong praja Kota Pekanbaru di Kepalai oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan dibantu oleh empat orang Pejabat Eselon IV yang diantaranya adalah:

1. Kasabug Tata Usaha
2. Kasi Operasional
3. Kasi Pembinaan dan Kapasitas
4. Kasi PPNS

Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan polisi pamong praja mempunyai tugas dalam penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya satuan polisi pamong praja mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Pelaksanaan koordinasi peraturan Daerah, dan peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Aparatur lainnya.

Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

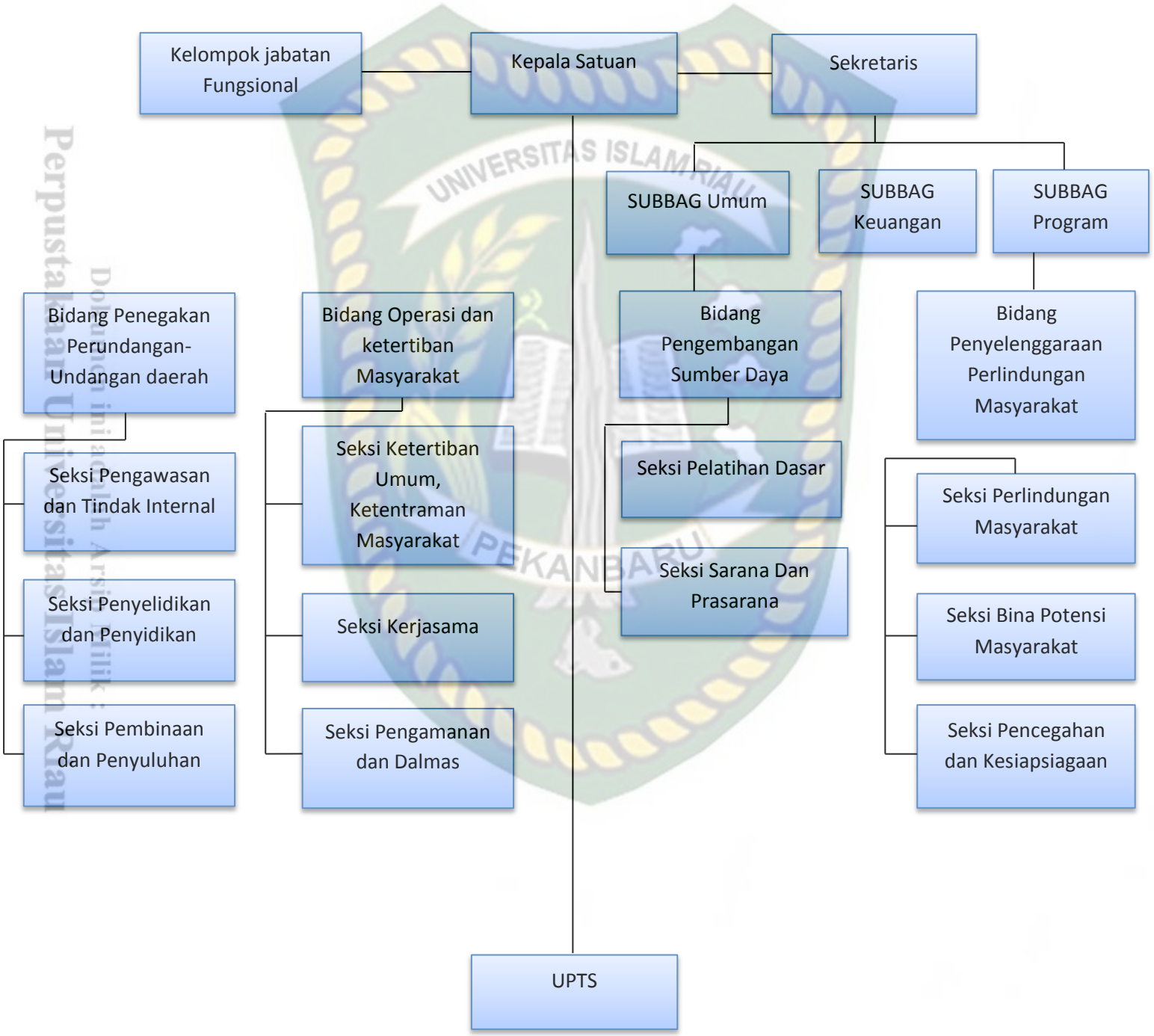
Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan penertiban Non Yustisial terhadap wara masyrakat, Aparatur atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah Kepala Daerah.
2. Menindak Warga/ Masyrakat, Aparatur/ Badan Hukum yang meganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
3. Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaran perlindungan masyrakat.
4. Melakukan tindakan penyidikan terhadap masyarakat, Aparatur/Badan Hukum yang melakukan pelanggaran dan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah
5. Melakukan tindakan administrative terhadap warga Masyarakat/Aparatur/Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Gambar IV.2 Struktur Organisasi Satpol PP Kota Pekanbaru



Sumber : Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru 2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU
Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adapun tugas dari masing-masing tersebut diatas adalah:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas:
    a) Merumuskan dan mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta kebijakan atau keputusan kepala dareah
    b) Melaksanakan kebijakan pemeliharaan danpenyelenggaraan ketentaman dan ketertiban umum di daerah
    c) Melaksanakan kebijakan penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta kebijakan atau keputusan kepala daerah
    d) Pengkoordinasian pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan derah dan perturan kepala daerah dengan aparat kepolisian negara, penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS atau aparatur lainnya
    e) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas
    f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Tugas:
    a) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka penyusnan statistik dan pelaporan
    b) Merumuskan dan melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c) Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan
d) Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, dan perjalanan dinas
e) Merumuskan dan melaksanakan pembayaran gaji dan pembayaran keuangan lainnya, serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan
f) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan berkala kepala satuan
g) Menyusun tindak lanjut laporan masyrakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya
h) Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan dan penyusnan program
i) Menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusnan program satuan
j) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkunan satuan polisi pamong praja
k) Mewakili kepal satuan apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak ada di tempat
l) Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk admiistrasi keuangan, kepegawaian, tata

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

persuratan, perlengkapan, umumdan rumah tanga di lingkungan satuan

m) Mengkoordinasaikan dan melaksnakan pelayanan dan pengaturan rapat dians, upacara serta keprotokolan

n) Mengkoordinasikan, membina, merumuskan, membuat laporan tahunan dan evaluasi sebagai pertaggung jawaban satuan

o) Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanankantor dan lingkunganya, kendaraan dinas serta perlngkapan geung kantor

p) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing

q) Mengevaluasi tugas sub bagian tata usaha berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut

r) Melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha kepada atasan secara lisan maupun tulisan

s) Memfasilitasi dan asitensi tugas sub bagian tata usaha dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisai dan bimbinagn teksnis

t) Melaksanaakn tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Seksi Operasional mempunyai Tugas:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah
b) Merumuskan dan melaksanakan program kerja operasional ketrntraman dan ketertiban umum
c) Menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian operasional
d) Merumuskan dan mengkoordinasikan kerja sama dengan instansi, satuan kerja peerangkat daerah, atau lembaga terkait lainnya
e) Merumuskan dan melaksanakan pengawalan dan kesamaptaan
f) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing
g) Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas seksi operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut
h) Memfasilitasi dan asistensi tugas seksi operasional dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teksnis
i) Melaksankan tugas-tugas lain yang diberika oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas mempunyai Tugas:
    a) Merumuskan dan melaksnakan penyusnan dan perencanaan kebutuhan personil polisi pamong praja, pendidikan dan latihan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam rangka pengembangan kemampuan dan keterampilan personil, kelengkapan dan peralatan kerja

b) Merumuskan dan melaksnakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan pengembangan kapasitas
c) Memfasilitasi dan merumuskan pelaksanaan penyuluhan di bidang ketentraman dan ketertiban serta penegkan peraturan daerah dan keputusan wali kota
d) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing
e) Melaksankan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas seksi pembinaan pengembangan kapasitas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut
f) Memfasilitasi dan asistensi tugas seksi pembinaan pengembangan kapasitas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis
g) Melaksnaakn tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil meempunyai Tugas:
   a) Merumuskan dan melaksanakan penyusnan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka melakukan penyeidikan pelanggaran Perda dan Peraturan Wali Kota

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b) Menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang penyidikan
c) Merumuskan dan melaksnakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyidikan
d) Merumuskan dan melaksnakan penyusnan personil PPNS, pendidkan dan latihan dalam rangka mengembangkan kemampuan PPNS
e) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing
f) Melaksnakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas seksi penyidik pegawai negeri sipil berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut
g) Memfasilitasi dan asistensi tugas seksi penyidik pegawai negeri sipil dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis
h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas dan akurat. Dengan bertemu beberapa responden secara langsung yaitu pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Identitas responden yang ditemukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Tabel V.1 Identitas Key Informan

NO	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Pendidikan
1.	Drs. Bustami, MM	Laki-laki	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	S2
2.	Agustian, AP, M.Si	Laki-laki	Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial	S2
3.	Desheriyanto, S.STP	Laki-laki	Kabid Ketertiban Masyrakat	S1
4.	Rawinto, S.E	Laki-laki	Seksi Kerjasama	S1

Sumber : Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel diatas yang menjadi keyinforman dari Dinas Sosial berjumlah dua orang, dari Satpol PP berjumlah dua orang, dari masyarakat berjumlah dua orang, dan dari gelandangan dan pengemis berjumlah dua orang. Yang menjadi key informan dalam penelitan ini adalah Bapak Drs. Bustami, Kabid Rehabilitasi Sosial MM, Bapak Agustian, AP, M.Si Kepala Sesi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Rehabilitasi Tuna Sosial dan Bapak Desheriyanto, S.STP, Kabid Ketertiban Masyarakat dan Bapak Rawinto, S.E. Kepala Seksi Kerja Sama.

Untuk mengetahui apakah Implememntasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial memberikan hasil atau perubahan peneliti melakukan wawancara dengan Informan disekitar terjadi operasi kegiatan mengemis diruang lingkup masyarakat dan pengguna jalan serta tidak lupa dengan Gelandangan dan pengemis. Berikut data Informan yang di wawancarai oleh peneliti:

2. Tabel V.2 Identitas Responden Masyarakat

NO.	Nama	Jenis Kelamin	Tamatan	Umur
1.	Syahrul	Laki-laki	SMP	53 Tahun
2.	Rahmat	Perempuan	SMP	32 Tahun
3.	Yoga	Laki-laki	SMP	38 Tahun
4.	Anto	Laki-laki	SD	41 Tahun
5.	Jumadi	Laki-laki	SMA	45 Tahun
6.	Hendri	Laki-laki	SMA	25 Tahun
7.	Lisa	Perempuan	SMP	29 Tahun
8.	Alvian	Laki-laki	SD	37 Tahun
9.	Heni	Perempuan	SD	32 Tahun
10.	Sinta	Laki-laki	SD	25 Tahun

Sumber : Olahan Penulis, 2020

3. Tabel V.3 Identitas Responden Gelandangan dan Pengemis

NO	Nama	Jenis Kelamin	Tamatan	Umur
1.	Yusafri	Laki-laki	SMA	19 Tahun
2.	Hanan Mardiah	Perempuan	SMP	15 Tahun

Sumber : Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel diatas peneliti melakukan wawancara dengan dua orang gelandangan dan pengemis yang ada dijalanan, Masyarakat yang masuk dalam ruang lingkup operasi Gelandangan dan Pengemis berjumlah lima orang, dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Masyarakat pengguna jalan yang melintasi lokasi operasi gelandangan dan pengemis berjumlah lima orang. Peneliti melakukan wawancara dengan menyanyakan satu pertanyaan setiap satu sub indikator kepada responden.

B. Pembahasan Penelitan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Studi Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru.

Dalam penelitian ini terdiri dari dua key informan dari Dinas Sosial yaitu, Drs. Bustami, MM, Kabid Rehabilitasi Sosial, Bapak Agustian, AP, M.Si, Kepala Sesi Rehabilitasi Tuna Sosial dan dari Satpol PP terdiri dari dua key informan yaitu Bapak Desheriyanto, S.STP, Kabid Ketertiban dan Bapak Rawinto, S.E. Kepala Seksi Kerja Sama Dan terdiri dari dua belas Informan sebagai masyarakat Kota Pekanbaru, Masyarakat yang masuk dalam ruang lingkup operasi Gelandangan dan Pengemis berjumlah lima orang, dan Masyarakat pengguna jalan yang melintasi lokasi operasi gelandangan dan pengemis berjumlah lima orang, dua gelandangan dan pengemis. Data yang didapat oleh peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memenuhi kebutuhan dalam penelitian ini.

Dalam rangka mewujudkan Kota Pekanbaru yang berwawasan lingkungan madani, sesuai dengan Visi Wali Kota Pekanbaru Periode 2017-2022 yaitu: "Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Smart City Madani" dengan salah satu Misi nya yaitu: "Mewujudkan Lingkungan Perkotaan Yang Layak Huni (Liviable

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

City dan Ramah Lingkungan Green City)". Dinas Sosial melakukan Implementasi untuk mengatsi gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Pekanbaru.

Menurut Edward III terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun implementasi dapat diukur melalui indikator berikut:

1. Komunikasi
   a. Memberikan informasi dan arahan yang jelas dan akurat
   b. Mengadakan sosialisai
2. Sumber Daya
   a. Tersedianya sumber daya manusia
   b. Sarana dan prasaran
3. Disposisi
   a. Keseriusan dalam menjalankan kebijakan.
   b. Langkah yang dilakukan dalam melaksanakan kebijakan.
4. Struktur Birokrasi
   a. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas
   b. Pembagian tugas yang terstruktur dan memiliki fungsi masing-masing yang saling melengkapi

1. Komunikasi

Komunikasi adalah kegiatan atau interaksi anatara dua orang atau lebih dalam menjalankan sebuah pesan atau informasi. Komunikasi yang dimaksud adalah kelancaran dan kejelasan atau informasi yanag disampaikaan kepada pelaksanaan kebijakan dalam hal ini adalah Dinas Sosial. Dalam hal ini komunikasi adalah suatu proses penympaian informasi oleh Pemerintah kepada Badan/Dinas, stakeholder ataupun masyrakat terkait suatu kebijakan maupun program yang akan di aplikasikan dan dilaksanakan dalam rangka mencapai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tujuan yang telah ditetapkan. Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana Dinas Sosial dan Satpol PP menyampaikan informasi ataupun mensosialisasikan Implementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru). Dari hasil penelititian dengan Keyinforman dari Dinas Sosial dan Satpol PP pada indikator Komunikasi maka mengenai tanggapan keyinforman terhadap Implementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru) menunjukkan bahwa penyampaian informasi dan sosialisasi yang telah di lakukan dalam Implementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial ini sudah berjalan dengan baik. Dari indikator komunikasi, item penilaian yaitu: Memberikan informasi dan Mengadakan sosialisai.

a. **Membeikan informasi merupakan merupakan suatu komunikasi untuk memberikan informasi yang terdiri dari berbagai catatan, ataupun laporan untuk lebih jelas dan akurat.**

Dilihat dari hasil wawancara Keyinforman dengan ***Bapak Drs. Bustami, MM*** (Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial) Dinas Sosial terkait informasi tentang Implementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru) diperoleh informasi sebagai berikut :

"Informasi terkait gepeng sudah dilakukan dengan cara memasang baleho dan menyebarkan brosur diberbagai tempat seperti dilampu-lampu merah yang banyak terdapat titik gepeng, bahkan di halte-halte bus. Informasi ini

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terkait dengan masyarakat yang masih memberi kepada gepeng. Masyarakat Kota Pekanbaru sebagian sudah memahai tentang peraturan Undang-Undang mengenai gepeng tetapi masyarakat yang berkunjung dari luar Kota Pekanbaru masih memberi sumbangan kepada gepeng tersebut. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat ketidakberhasilannya Undang-Undang tersebut".

(Wawancara : Senin 10 Agustus 2020, pukul 10.27 WIB).

Adapun hasil wawancara Keyinforman dengan ***Bapak Agustian, AP, M.Si*** (Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi Tuna Sosial) Dinas Sosial terkait informasi tentang Implementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru) diperoleh informasi sebagai berikut :

"*Informasi terkait Undang-undang No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial sudah diinformasikan secara baik kepada staff /pegawai Dinas Sosial, masyrakat, gelandangan dan pengemis secara tertulis maupun lisan melalui media elektronik dan cetak di Kota Pekanbaru.*

(Wawancara : Selasa 1 September 2020, pukul 09.01 WIB).

Dari kutipan wawancara yang sebelumnya dapat dilihat bahwa tanggapan Bapak Drs. Bustami, MM sebagai Bidang Rehabilitasi Sosial dengan Bapak Agustian, AP, M.Si sebagai Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial terhadap item penilaian informasi menyatakan hal tersebut sudah dilakukan untuk menunjang Implementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial. Kemudian tanggapan yang mereka berikan dan kutipan wawancara diatas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menjelaskan bahwa untuk indikator komunikasi cukup terimplementasi dengan baik.

Adapun hasil wawancara Keyinforman dari ***Bapak Desheriyanto, S.STP*** *(Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat) Satpol PP terkait informasi*, yaitu sebagai berikut:

> *"Saya sudah memberikan informasi kepada petugas mengenai peraturan Undang-Undang Tentang Ketertiban Sosial dari Dinas Sosial. Dan tugas kami yang merazia, menertibkan gelandangan dan pengemis dijalanan dan kami saling bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk mengatasi gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Pekanbaru untuk menciptakan Kota yang tentram".*
>
> *(Wawancara : Rabu 2 September 2020, pukul 09.26 WIB).*

Dari hasil wawancara oleh Kepala Bidang Operasi Dan Ketertiban Masyarakat Bapak Desheriyanto S.STP terkait informasi diatas dapat di lihat bahwa Satpol PP dan Dinas Sosial telah bekerja sama dalam menangani gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. Penyampaian informasi yang dilakukan Satpol PP terhadap gelandangan dan pengemis di lakukan dengan cara penertiban, pengumpulan di kantor Satpol PP untuk diberikan arahan dan sosialisasi agar tidak meminta-minta lagi dijalanan, dan menyebabkan bahaya akan diri sendiri ketika berada dijalan.

Kemudian adapun hasil wawancara Keyinforman oleh ***Bapak Rawinto, S.E*** (Kepala Bidang Seksi Kerjasama) *Satpol PP* terkait informasi yaitu sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

''Saya sudah memberikan informasi kepada petugas satpol PP, masyarakat Kota Pekanbaru setiap harinya untuk turun ke lapangan merazia atau menertibkan gelandangan dan pengemis dan memberitahu kepada masyarakat untuk tidak memberikan sumbangan kepada mereka, karena itu melanggar isi dari peraturan undang-undang tersebut . Dan sebagian masyarakat ada yang melaksanakan dan sebagian lagi tidak''.

(Wawancara : Rabu 2 September 2020, pukul 11.10 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rawinto S.E diatas, Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Pekanbaru bahwasanya telah bekerja sama menertibkan dan membina gelandangan dan pengemis secara cepat dan tepat, namun masih banyak gepeng yang masih berkeliaran dan masyarakat yang masih suka memberi. Meskipun begitu Dinas Sosial dan Satpol PP tetap menjalankna tugas dan fungsinya secara rutin.

Kemudian tanggapan dari bapak Desheriyanto S.STP dan bapak Rawinto S.E berikan dan kutipan wawancara diatas menjelaskan bahwa untuk indikator komunikasi cukup terimplementasi dengan baik.

Dilihat dari hasil wawancara Keyinforman Dinas Sosial dan Satpol PP mengenai Implementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial cukup terimplementasi dengan baik dikarenakan sebagian gelandangan dan pengemis masih berkeliaran di jalan, tidak hanya itu masyarakat juga masih memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis. Meskipun peraturan ini telah dikeluarkan sejak 2008, pada kenyataanya masih banyak masyarakat yang masih belum paham akan isi peraturan undang-undang tersebut. Hal itulah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang menjadi Implementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial ini cukup terimplementasi dengan baik.

Adapun hasil wawancara oleh Informan ***Bapak Syahrul*** sebagai masyarakat Kota Pekanbaru terkait informasi sebagai berikut :

"Saya sedikit paham mengenai undang-undang ketertiban sosial ini, tetapi saya tidak suka karena ada simbolisnya anak terlantar itu ditanggung oleh Negara tapi pada kenyataanya sekarang kenapa gepeng itu banyak karena kurangnya lapangan pekerjaan, kemudian kurangnya pendidikan, faktor ekonomi dan kurangnya ilmu agama karena kurang pahamnya tentang agama membuat mereka merasa kurang bersyukur".

(Wawancara : Senin 10 Agustus 2020, pukul 17.29 WIB).

Dari kutipan wawancara yang telah dijelaskan oleh Bapak Syahrul terhadap penyampaian informasi mengenai gelandangan dan pengemis dapat di telaah bahwa tidak banyak masayarkat yang memahami tentang undang-undang ketertiban sosial. Penyebab seseorang menjadi gelandagan dan pengemis karena kurangnya ilmu agama yang membuat mereka putus asa sehingga kurang bersyukur dan mengharapkan belas kasihan kepada orang lain, selain itu juga disebabkan oleh faktor ekonomi.

Kemudian adapun hasil Wawancara oleh Informan ***Bapak Ikhwan*** sebagai masyarakat Pekanbaru terkait informasi yaitu sebagai berikut:

"Pernah dengar tentang Undang-Undang ketertiban ini, tapi yang saya lihat memang masih banyak kurangnya kesadaran dari masyarakat Kota Pekanbaru untuk tidak peduli dengan isi Undang-undang tersebut. Mereka

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, hal itu lah yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Pekanbaru".

(Wawancara : Senin 10 Agustus 2020, pukul 18.20 WIB).

Adapun hasil wawancara yang dilakukan kepada Informan ***Ibu Lisa*** sebagai masyrakat Pekanbaru terkait informasi yaitu sebagai berikut:

"*Saya tahu dan pernah melihati dari baleho dan brosur yang disebarkan dijalanan. Memang benar seharusnya tidak boleh memberi sumbangan kepada gepeng karena menjadi kebiasaan dan tidak mau usaha mencari pekerjaan yang lebih baik"*

(Wawancara : Minggu 20 September 2020 pukul 17.00 WIB).

Dari hasil wawancara oleh Bapak Ikhwan dengan Ibu Lisa bahwa masih banyak masyarakat yang kurang peduli dengan peraturan yang berlaku dapat di lihat dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. Hal inilah yang menjadi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial cukup terimplementasi dengan baik.

Adapun hasil Wawancara yang dilakukan kepada Informan ***Hanan Mardiah*** sebagai gelandangan dan pengemis terkait informasi yaitu sebagai berikut:

"Saya pernah dengar peraturan Undang-Undang ketertiban ini tapi saya tetap lakukan demi kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan uang, meskipun di mata masyarakat pengemis terlihat tidak baik dan mungkin ada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sebagian masyarakat yang merasa terganggu dengan keberadaan kami. (Wawancara : Senin 10 Agustus 2020, pukul 17.51 WIB).

Kemudian adapun hasil wawancara yang dilakukan kepada Informan ***Abu Bakar*** sebagai pengamen jalanan yaitu sebagai berikut:

"Saya sedikit tahu mengenai Undang-Undang Ketertiban ini, tapi saya tetap mengamen karena saya hidup sendiri dan pastinya memerlukan uang untuk sambungan hidup kedepannya karena ini satu-satunya mata pencaharian saya".

(Wawancara : Senin 10 Agustus 2020, pukul 18.01 WIB).

Dari hasil kutipan wawancara diatas oleh informan Hanan Mardiah dan Abu Bakar bahwa beliau terpaksa menjadi pengemis untuk mendapatkan uang demi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagian pengemis tidak mau mencari pekerjaan yang lebih layak karena sudah pasrah duluan dan sudah nyaman dengan keadaan yang sekarang. Satpol PP juga memberikan sosialisasi secara langsung kepada gelandangan dan pengemis yang terjaring razia.

b. Mengadakan Sosialisasi merupakan suatu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seseorang untuk penanaman nilai dan aturan.

Dari sub indikator sosialisasi didapat hasil wawancara Keyinforman yang dilakukan dengan ***Bapak Drs. Bustami MM*** (Kepala Bidang Rehabilitasi Ssoial) Dinas Sosial terkait sosialisasi yaitu sebagai berikut :

"Padahal sosialisasi sudah dilakukan dengan menggunakan sarana baleho dan brosur dan disebarkan dilampu-lampu merah, bahkan di halte-halte

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bus, namun seperti nya masyarakat tidak membaca dan bahkan tidak peduli, ada sebagian masyarakat Kota Pekanbaru yang sudah mulai memahami tetapi masyrakat dari luar kota pekanbaru yang berkunjung pada akhir pekan tidak paham akan larangan memberi sumbangan kepada gepeng".

(Wawancara : Senin 10 Agustus 2020, pukul 10.27 WIB).

Dari kutipan wawancara yang sebelumnya dapat dilihat bahwa tanggapan Bapak Drs. Bustami, MM sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial terhadap item penilaian sosialisasi menyatakan hal tersebut sudah dilakukan untuk menunjang Implementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial. Kemudian tanggapan yang diberikan dan kutipan wawancara diatas menjelaskan bahwa untuk indikator komunikasi sosialisasi cukup terimplementasi dengan baik.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan kepada Informan ***Bapak Rahmat*** sebagai masyarakat Pekanbaru terkait sosialisasi yaitu sebagai berikut:

"Sebelumnya saya pernah melihat sosialisai yang dilakukan oleh Dinas Sosial di pasar Ramaya tapi pada saat itu saya hanya melihat dari jauh dan mendengar dari jauh yang diterangkan oleh Dinas Sosial tersebut bahwa tidak boleh mengemis ataupun memberi sumbangan kepada gepeng".

(Wawancara : Selasa 18 Agustus 2020 pukul 16.30 WIB)

Kemudian adapun hasil wawancara yang dilakukan kepada Informan ***Bapak Jumadi*** sebagai masyarakat Pekanbaru terkait sosialisasi yaitu sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"Saya pernah mendengar sosialisasi yang disampaikan oleh Dinas Sosial dan itu tidak menjadi masalah bagi saya karena apa salahnya kita memberi kepada orang yang kurang mampu sebagai dalam bentuk sedekah dan itu tidak akan mengurangi kita menjadi miskin semua tergantung persepsi bagi saya itu tidak salah menolong orang"

(wawancara : Selasa 18 Agustus 2020 pukul 17.30 WIB).

Dilihat dari informan masyarakat dan informan gelandangan dan pengemis diatas, Implementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial cukup terimplementasi dengan baik. Dinas Sosial dan Satpol PP sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan informasi dan mensosialisakikan kepada masyarakat Kota Pekanbaru, hanya saja masyarakat tidak mau tahu apa yang disampaikan kepada Dinas Sosial dan Satpol PP sehingga mengakibatkan mereka tidak paham apa yang sudah di Sosialisasikan kepada Dinas Sosial dan Satpol PP.

Sejauh ini sebagian masyarakat masih belum paham mengenai undang-undang dan tidak sadar bahwa yang mereka lakukan ketika memberi sumbangan kepada gepeng bisa menyebabkan gelandangan dan pengemis tersebut menjadi terus-terusan meminta sehingga membuat mereka enggan untuk berhenti menjadi gepeng. Sebagian masyarakat ada yang setuju untuk memberi sumbangan kepada gepeng dan sebagian lagi tidak setuju karena mematuhi peraturan Undang-Undang yang telah ditentukan. Hal ini juga yang menjadi penyebab cukup terimplementasinya Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan unsur dari indikator pelaksanaan yang sangat penting, karena tanpa adanya sumber daya suatu organisasi tidak dapat berjalan. Sumber daya merupakan suatu hal yang pokok dari suatu organisasi publik ataupun swasta. Sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini ialah tersedianya sumber-sumber pendukung ataupun penunjang dalam pelaksanaan kebijakan seperti staff, sumber dana, kewenangan, fasilitas dan lain sebagainya yang mendukung proses pelaksanaan kebijakan. Semakin memadadi sumber daya dari suatu organisasi maka, akan berjalan secara efektif pula kebijakan yang dibuat suatu organisasi.

Dalam penelitian ini yang dimaksud yaitu sumber daya manusia yang mana kelompok kerja yan terdapat dalam Implementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial. Kemudian adapun tanggapan keyinforman dalam item penilaian indikator sumber daya tentang Implementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial di Kota Pekanbaru.

a. **Tersedianya Sumber Daya Manusia, merupakan menjadi faktor utama untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkans ebelumnya karena mereka yang menggerakkan untuk keberhasilan tercapainya sasaran yang sudah ditetapkan.**

Berdasarkan hasil wawancara Keyinforman dengan ***Bapak Agustian, AP, M.Si*** (Kepala Sesi Bidang Rehabilitasi Tuna Sosial) Dinas Sosial terkait sumber daya manusia dalam menjalankan Implementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2008 Tentang Ketertiban Sosial di Dinas Sosial Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut :

> *"Sumber daya manusia pada Dinas Sosial dibagi atas tim pemantauan dan penanganan, kegiatan tim reaksi cepat (TRC). Kegiatan ini dilakukan selama 20 hari kerja/bulan. Tim TRC dibagi menjadi 2 tim, satu tim terdiri dari 4 orang. Pemantauan dan penanganan dilakukan pada pagi hari pukul 100.00 WIB s/d 12.00 WIB dan sore hari pukul 14.00 WIB s/d 16.00 WIB. Tim TRC wajib menangani atau merespon kasus yang terjadi diluar jam kerja. Sumber daya di Dinas Soial sendiri masih kurang, kami juga memiliki tim relawan untuk membantu proses kegiatan di lapangan dan sebenarnya kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan kebijakan ini. Tetapi gepeng dan masyarakat lah yang masih belum paham dan mengerti dengan aturan yang sudah diterapkan ini lah yang mengakibatkan gepeng masih banyak berkeliaran di Kota Pekanbaru dan masyarakat yang masih suka memberi. Ini yang menjadikan Dinas Sosial kurang efisien dalam menjalankan tugasnya masing-masing terlebih lagi gepeng yang tertangkap tidak pernah merasakan efek jera".*
>
> *(Wawancara : Selasa 1 September 2020, pukul 09.01 WIB).*

Dari kutipan wawancara yang telah dipaparkan dapat ditelaah bahwa dalam item penilaian sumber daya manusia terkait indikator sumber daya didalam proses Implementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial ada kelompok kerja yang bertugas melaksanakan pemantauan dan penanganan di setiap persimpangan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adapun hasil wawancara Keyinforman yang dilakukan dengan ***Bapak Desheriyanto, S.STP*** (Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat) Satpol PP terkait sumber daya yaitu sebagai berikut:

> *"Pada satpol PP sendiri sumber daya yang dimiliki sebanyak 300 orang petugas dalam menjalankan tugasnya. Dari 300 orang petugas dibagi menjadi dua bagian, pada bagian yang pertama khususnya untuk menertibkan gepeng dijalanan ataupun ditempat umum, sedangkan bagian yang kedua untuk pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala satuan".*
>
> *(Wawancara : Rabu 2 September 2020, pukul 09.26 WIB).*

Dari kutipan wawancara yang telah dipaparkan oleh Bapak Deshariyanto S.STP di Satpol PP terkait sumber daya manusia, dapat kita pahami bahwa sumber daya yang terdapat pada Satpol PP sudah cukup terpenuhi dalam pembagian tugas dan tugas turun ke lapangan mereka lakukan setiap hari. Untuk meminimalisir gepeng yang berkeliaran di Kota Pekanbaru.

b. Sarana dan Prasarana, adalah sarana segala sesuatu yang dipakai sebagai alat daam mencpai maksud dan tujuan, sedangkan prasarana segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

Adapun hasil wawancara Keyinforman yang dilakukan dengan ***Bapak Drs. Bustami, MM*** (Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial) Dinas Sosial terkait sarana prasarana yaitu sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"Sarana dan prasarana pada Dinas Sosial sudah cukup memadai, kami menyediakan mobil untuk melakaukan pengintaian kepada gepeng dijalanan dan mempunyai ruang selter untuk penampungan gepeng yang sudah tertangkap baik ditangkap oleh Dinas Sosial maupun Satpol PP. Disitu mereka akan diberi pembinaan seperti pembinaan rohani, sosial, psikolog dan ada tenaga medis yang memeriksa kesehatan mereka dan diarahkan agar tidak menjadi gepeng dijalanan".

(Wawancara : Senin 10 Agustus 2020, pukul 10.27 WIB).

Dari petikan wawancara yang telah dipaparkan oleh Bapak Drs. Bustami, MM terkait sarana dan prasarana, dapat kita pahami bahwa di Dinas Sosial penyediaan mobil digunakan untuk melakukan pengintaian kepada gelandangan dan pengemis yang berkeliaran dijalan. Selain itu pihak Dinas Sosial menyediakan ruang selter bagi gepeng yang tertangkap untuk diberi pembinaan dan diberi keterampilan. Dinas sosial juga bekerjasama dengan satpol pp terkait sumber daya, sarana dan prasarana sebagai pendukung tercapainya tujuan implentasi peraturan daerah no 12 tahun 2008 tenang ketertiban sosial.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara Keyinforman yang dilakukan dengan ***Bapak Rawinto S.E*** (Kepala Seksi Kerjasama) Satpol PP terkait sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut:

"Kalau dari Satpol PP sarana dan prasarana yang dipakai berupa mobil sama halnya yang dipakai pada Dinas Sosial. Selain itu sarana prasarana sudah cukup memadai karena satpol PP bekerja sama dengan Dinas Sosial dimana kami yang menertibkan mereka dijalanan dan mendata mereka

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

setelah itu kami antar mereka kepada Dinas Sosial untuk dilakukan penanganan selanjutnya seperti mereka di beri pembinaan kepada Dinas Sosial".

(Wawancara : Rabu 2 September 2020, pukul 09.26 WIB).

Dilihat dari kutipan wawancara dengn Bapak Rawinto S.E diatas dapat kita pahami bahwa Satpol PP Satpol PP sudah cukup memadai, setelah di tangkap mereka didata dan diberi pembinaan dari Dinas Sosial agar diarahkan untuk tidak meminta-minta. Bahkan mereka diberi modal supaya bisa membuka usaha untuk tidak menjadi pengemis.

Selanjutnya dilihat dari item penilaian indikator sumber daya dan sarana prasarana pada kategori cukup terimplementasi pada Dinas Sosial dan Satpol PP. Sumber daya manusia juga harus didukung oleh sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Disposisi

Disposisi adalah karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam melaksankan sebuah kebijakan. Jika pelaksana kebijakan mempunyai sikap yang baik maka kebijakan akan terlaksana dengan baik. Dalam hal ini Dinas Sosial dan Satpol PP melaksanakan kebijakan dengan bertanggung jawab dan saling bekerjasama, agar proses penertiban gelandnagan dan pengemis berjalan dengan efektif.

Didalam penelitian ini, yang sehubungan dengan disposisi yaitu tanggung jawab dari Kepala Dinas Sosial dengan Kepala Satpol PP dan melaksanakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tuugas secara profesional dan cakap dalam proses implementasi peraturan daerah no 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial. Karena jika Dinas Sosial dan Satpol PP melaksanakan tugas dnegan baik dan penuh rasa tanggung jawab, implementasi peraturan daerah no 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial akan berjalan sesuai dengan tujuan yang terlah ditetapkan dalam organisasi tersebut.

a. **Keseriusan dalam Menjalankan Kebijakan, merupakan kebijakan tersebut menjadi panduan bagi pemeritah dan untuk serius menyikapi isi dari peraturan daerah dalam waktu jangka panjang sesuai rencana yang ytelah ditetapkan sebelumnya.**

Adapun hasil wawancara Keyinforman yang dilakukan dengan ***Bapak Drs. Bustami, MM*** (Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial) pada Dinas Sosial terkait disposisi yaitu sebagai berikut :

"Dinas Sosial sudah maksimal menjalankan kebijakan ini, dan yang menjadi masalah terhadap gepeng tersebut yang tidak pernah jera tertangkap yaitu kadang mereka yang menawarkan diri sendiri untuk ditangkap karena didalam selter tersebut mereka di beri makan 3x sehari dan di beri baju yang layak untuk diganti. Dinas Sosial memberi himbauan kepada gepeng dan masyrakat satu hari dua kali pada jam 10.00-12.00 WIB dan di sambung pada jam 14.00-16.00 WIB. Dinas Sosial menggunakan mobil dengan cara menggunakan toa seperti "halo-halo", brosur disebar dan ditempel, serta baleho. Bahkan saya sendiri masuk kehalte-halte bus untuk ikut membagikan brosur tersebut kepada masyarakat Kota Pekanbaru".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(Wawancara : Senin 10 Agustus 2020, pukul 10.27 WIB).

Kemudian hasil wawancara Keyinforman yang dilakukan dengan ***Bapak Rawinto, S.E*** (Kepala Bidang Seksi Kerjasama) Satpol PP terkait disposisi, yaitu sebagai berikut:

"Dari satpol PP sendiri kami tetap menjalankan tugas kami sebagaimana mestinya apa lagi menyangkut tentang masalah ketertiban pastinya kami selalu memantau dimana titik-titik tempat gepeng biasa beroperasi. Dan apa bila ada yang tertangkap kami beri sanksi ringan seperti contohnya, ada gepeng yang pura-pura pincang pas ketahuan berbohong kami suruh untuk mergakan apa yang dia lakukan agar ada merasa efek jera. Tapi pada kenyataannya mereka tidak pernah jera tetap mengmis dijalanan alasanya untuk menyambung kebutuhan mereka sehari-hari".

(Wawancara : Rabu 2 September 2020, pukul 11.10 WIB).

Dari hasil kutipan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs. Bustami, MM pada Dinas Ssoial dan Bapak Rawinto S.E pada SAtpol PP diatas dapat dipahami bahwa Dinas Sosial sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan kebijakan ini, hanya saja terkendala pada masyarakat dan gepeng yang belum paham ataupun belum sadar terkait Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan. Dari beberapa jawaban item pertanyaan yang dinilai oleh keyinforman diatas berada pada kategori cukup terimplementasi.

Selanjutnya adapun hasil wawancara Informan dari masyarakat Kota Pekanbaru dengan ***Bapak Anto*** terkait disposisi yaitu sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"Dinas Sosial masih lemah dalam menjalankan kebijakan ini karena pada kenyataanya masih banyak ditemui gepeng di Kota Pekanbaru. Terlebih lagi pada saat mereka dikasih pembinaan mereka pasti di beri keterampilan contohnya menjahit, pada saat mereka selesai diajarkan menjahit tapi Dinas Sosial lepas tangan beigtu saja tidak diberi modal untuk kedepanya itu yang membuat mereka kesusahan jadi pilihan akhir beralih kejalanan untuk meminta-minta. Diberi modal pun gepeng belum tentu mau membuka usaha, karna sudah nyaman dengan cara meminta-minta".

(Wawancara : 21 Agustus 2020 Pukul 16.40 WIB).

Kemudian adapun hasil wawancara Informan dari masyarakat Kota Pekanbaru dengan ***Bapak Hendri*** yaitu sebagai berikut :

"Dari Dinas Sosial itu masih kurang dalam mengatasi permasalahan gepeng yang ada di Kota Pekanbaru. Apa karena kurang kesadaran dari masyarakat atau gepeng yang belum mengerti dalam kebijakan tersebut. Contohnya masih banyak juga masyarakat yang memberi kepada gepeng dijalanan itu yang menjadikan kebiasaan gepeng untuk meminta-minta karena ingin diberi belas kasihan".

(Wawancara : 21 Agustus 2020 Pukul 17.10 WIB).

Dari kutipan hasil wawancara informan dengan bapak Anto dan Bapak Hendri bahwa Dinas Sosial sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan keterampilan dan modal usaha kepada gepeng, hanya saja gepeng itu sendiri yang tidak mau diberi modal karena sudah nyaman dengan cara meminta-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

minta. Masyarakat dan gepeng juga tidak paham dengan kebijakan yang berlaku. Dilihat dari hlasil jawaban informan terdapat kategori cukup terimplementasi.

b. Langkah yang dilakukan dalam melaksanakan kebijakan, pertama dibuat dan diproses oleh lembaga pemerintahan berdasarkan prosedur yang ditetapkan. Kedua bersifat memaksa atau berpengaruh terhadap tindakan privat masyarakat luas (publik).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Keyinforman ***Bapak Drs. Bustami, MM*** (Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial) Dinas Sosial terkait langkah yang dilakukan dalam melaksankaan kebiijakan yaitu sebagai berikut:

"Kami selalu mengajak masyarakat untuk tidak memberi sumbangan kepada gepeng karena itu bisa membuat kebiasaan terhadap gepeng, terlebih lagi membuat gepeng menjadi malas karena dengan mengharapkan belas kasihan kepada orang lain mereka mendapatkan uang. Kendala pada kami mereka dibina 3-7 hari setelah dilakukan pembinaan selang dua hari mereka turun lagi ke jalanan dan begitu seterusnya, karena kami tidak boleh memberikan sanksi. Sanksi disini sudah ada didalam peraturan daerah denda 50 juta dan kurungan waktu 3 bulan tapi ini tidak pernah dilakukan karena tidak ada anti piring".

(Wawancara : Senin 10 Agustus 2020, pukul 10.27 WIB).

Kemudian Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Keyinforman ***Bapak Rawinto, S.E*** (Kepala Bidang Seksi Kerjasama) Satpol PP terkait langkah yang dilakukan dalam melaksanakan kebijakan yaitu sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"Kami selalu turun kelapangan setiap hari untuk menertibkan dan merazia gepeng dijalanan, tapi kendala pada petugas gepeng tersebut sudah lebih tahu duluan kalau ada operasi dijalanan karena dari jauh sudah melihat keberadaan kami bahkan mereka kalau yang sehat atau pura-pura menjadi cacat kabur agar tidak tertangkap oleh petugas".

(Wawancara : Rabu 2 September 2020, pukul 11.10 WIB).

Dari kutipan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs. Bustami, MM dengan Bapak Rawint S.E dapat dilihat bahwa Dinas Sosial dan Satpol PP sudah berusaha semaksimal mungkin dan sudah bekerjasama untuk mengurangi gepeng yang ada di Kota Pekanbaru, tetapi masih ada gepeng yang tidak mau mendengarkan dan tidak mengikuti intruksi yang di sampaikan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP. Dilihat dari jawaban keyinforman Implementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 berada pada kategori cukup terimplementasi.

Kemudian adapun hasil wawancara Informan dari masyarakat Kota Pekanbaru dengan ***Ibu Heni*** terkait dengan langkah yang di lakukan dalam melaksanakan kebijakan yaitu sebagai berikut :

"Sejauh ini belum pernah lihat langsung satpol PP yang menertibkan gepeng, tapi saya sering melihat mobil satpol PP lewat dijalan raya dan ditempat-tempat lain mungkin mereka ada menertibkannya tanpa sepengetahuan saya dan itu bagus jika memang iya untuk mengurangi gepeng yang ada dijalanan".

(Wawancara : Minggu 20 September 2020 pukul 10.00 WIB).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selanjutnya adapun hasil wawancara Informan dari masyarakat Kota Pekanbaru dengan ***Bapak Alvian*** terkait langkah yang dilakukan dalam melaksanakan kebijakan yaitu sebagai berikut :

"Pernah, di pasar bawah sewaktu satpol PP sebagain gepeng pada lari karena takut ditangkap sebagain lagi pasrah karena sudah tertangkap duluan. Menurut saya bagus jika satpol PP melakukan penertiban tersebut untuk mengurangi gepeng yang berkeliaran dijalanan agar tidak meresahkan masyarakat sekitar".

(wawancara : 19 September 2020 pukul 16.13 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti temui bahwa Dinas Sosial dan Satpol PP sudah menjalankan tugasnya dengan menertibkan gelandangan dan pengemis secara baik, dan sebagian masyarakat juga mendukung Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap gepeng tersebut untuk kenyamanan masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru. Dilihat dari jawaban informan Implementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 berada pada kategori cukup terimplementasi.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi adalah pelaksanaan kebijakan yang melibatkan orang banyak dan tentunya perlu adanya koordinasi yang baik anatara instansi-instansi yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang di maksud penelitian ini seperti stndar operasional prosedur dan pembagian tugas yang terstruktur dan memiliki fungsi masing-masing yang saling melengkapi. Kareana 2 item penilaian tersebut sangat mempengaruhi dalam Implementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. **Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), merupakan sebagai pedoman untuk memudahkan pelaksanaan kerja SOP yang berisi tahapan dan urutan suatu pekerjaan akan menuntun para pegawai dalam menyelesaikan tugasnya.**

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan dengan Keyinforman oleh ***Bapak Agustian AP, M.Si*** **(**Kepala Seksi Rehabilitasi Tunas Sosial) di Dinas Sosial terkait Standar operasional prosedur yaitu sebagai berikut :

"Sudah, karena kami mempunyai renstra yang sudah disusun untuk lima tahun kedepan. Renstra tersebut sebagai acuan untuk menetapkan sasaran yang sudah ditetapkan diawa".

(Wawancara : Selasa 1 September 2020 pukul 09.01 WIB).

Selanjutnya adapun hasil wawancara yang di lakukan dengan keyinforman ***Bapak Desheriyanto, S.STP*** (Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat) Satpol PP terkait standar operasional prosedur yaitu sebagai berikut :

"Sudah, karena kami mempunyai program kerja yang sudah ditetapkan dan semua petugas menjalankan tugas dan kewajibanya masing-masing sesuai yang sudah dilimpahkan sebelumnya".

(Wawancara : Rabu 2 September 2020, pukul 09.26 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti temui bahwa Dinas Sosial dan Satpol PP sudah melakukan SOP dengan benar sesuai dengan rencana strategi yang telah ditetapkan, begitu juga dengan satpol PP sudah memiliki pembagian tugas masing-masing. Dilihat dari jawaban keyinforman Implementasi Peraturan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Daerah No 12 Tahun 2008 pada sub inikator standar operasional prosedur berada pada kategori cukup terimplementasi.

b. Pembagian Tugas yang Terstruktur dan Memiliki Fungsi masing-masing yang saling melengkapi, merupakan sebagai bentuk cara dimana tugas dan tanggung jawab dialokasikan kepada individu-individu bertujuan untuk terciptanya kinerja organisasi yang efektif dan proses kerja yang cepat.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Keyinforman ***Bapak Agustian, AP, M.Si*** (Kepala Sesi Bidang Rehabilitasi Tuna Sosial) Dinas Sosial terkait pembagaian tugas yang terstruktur dan memiliki fungsi masing-masing yang saling melengkapi yaitu sebagai berikut:

"Setaip staff yang bekerja di Dinas Sosial sudah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing meskipun kami kekurangan staff tapi didalam Dinas Sosial pegawai membantu semua pekerjaan yang diberikan agar tugas yang dilimpahkan segera selesai"

(Wawancara : Selasa 1 September 2020, pukul 09.01 WIB).

Kemudian hasil Wawancara yang dilakukan dengan Keyinforman ***Bapak Rawinto, S.E*** (Kepala Bidang Seksi Kerjasama) Satpol PP terkait pembagaian tugas yang terstruktur dan memiliki fungsi masing-masing yang saling melengkapi yaitu sebagai berikut:

"Mereka sudah bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing walaupun ada keluhan dalam bertugas akan tetapi mereka sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur atau SOP yang berlaku".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(Wawancara : Rabu 2 September 2020, pukul 11.10 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara keyinforman yang dilakukan dengan Bapak Agustian AP, MS.i dan Bapak Desheriyanto, S.STP yang peneliti temui bahwa Dinas Sosial dan Satpol PP sudah melakukan tugasnya dengan baik sesuai SOP dan prosedur yang berlaku dan sudah melaukan pembagian tugas yang terstruktur dan memiliki fungsi masing-masing yang saling melengkapi. Hal ini sangat membantu dalam mengatasi masalah gelandangan dan pengemis yang terjadi di Kota Pekanbaru. Dilihat dari jawaban keyinforman Implementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 pada sub inikator pembagaian tugas yang terstruktur dan memiliki fungsi masing-masing yang saling melengkapi berada pada kategori cukup terimplementasi.

C. Analisis Hasil Penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Studi Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru.

Menurut teori oleh George C. Edward III (Zainal Ali & Raden Imam, 2005:69), keberhasilan implementasi dapat diukur dari 4 indikator yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Dalam penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Studi Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru cukup terlaksana. Namun perlu kerjasama dan kesadaran dari masyrakat agar bisa menuntaskan masalah gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. Karena kesadaran masyarakat Kota Pekanbaru masih kurang sadar akan isi peraturan Undang-Undang yang mengatur Ketertiban masyarakat, hal ini yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menyebabkan gepeng masih berkeliaran di Kota Pekanbaru. Meskipun Dinas Sosial dan Satpol PP sudah berupaya semaksimal mungkin, tidak akan berhasil jika masyarakat tidak ikut berpartisipasi. Belum adanya sanksi yang diberikan kepada masyrakat ataupun gepeng yang melanggar peraturan ini kareana belum adanya antipiring dari kepolisian. Sangat penting peran masyarakat dalam berpartisipasi agar Undang-Undang yang sudah diterapkan berhasil untuk menuntaskan gelandangaan dan pengemis di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Hasil Observasi (pengamtan langsung) yang di Lakukan Peneliti di lapangan terkait Hambatan pada Implementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru)

Pada indikator Komunikasi terdapat hambatan yakni, pihak Dinas Sosial dan Satpol PP memberikan informasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan yaitu meliputi sosialisasi, baik itu sosialisasi internal maupun eksternal ditambah dengan adanya forum diskusi antar pegawai dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam program pembinaan gelandangan dan pengemis hanya saja yang menjadi kendala masyarakat yang tidak mau tahu akan kebijakan yang sudah di tetapkan dan gepeng tidak pernah menaati isi dari peraturan yang sudah berlaku.

Selanjutnya indikator Sumber Daya bahwa jumlah staf yang ada pada Dinas Sosial masih sangat kurang sehingga dilakukan upaya pengoptimalan kinerja staf untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada, tetapi upaya ini kurang maksimal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

karena membebani pekerjaan di luar kemampuan dan berdampak pada pelaksanaan kebijakan menjadi tidak efektif.

Kemudian pada indikator Disposisi atau sikap pelaksana sangat menentukan keberhasilan implementasi dalam penangangan gelandangan dan pengemis yang dilakukan dengan cara pengawasan terhadap pendampingan gelandangan dan pengemis Kota Pekanbaru.

Dan pada indikator Struktur Birokrasi pembagian tugas terhadap masing-masing staf masih kurang jelas dalam melakukan wewenangnya karena kurangnya staf, jadi staf pada Dinas Sosial bisa memegang dua jabatan bahkan yang bukan bagian yang seharusnya dikerjakan terpkasa dikerjakan agar pekerjaan yang sudah diberikan oleh atasan terselesaikan.

D. Faktor-faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru)

1. Faktor lingkungan, dimana masih kurangnya dukungan dari lembaga-lembaga sosial maupun pihak-pihak swasta dalam mengatasi masalah gelandangan dan pengemis, begitu juga dengan kurangnya dukungan dari masyarakat untuk mengatasi gelandangan dan pengemis ini membuat uasha yang di lakukan pemerintah dalam mengatasi masalah ini menjadi lebih sulit.
2. Faktor sumber daya manusia, kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial sangat terbatas sehingga kemampuan untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melakukan pembinaan baik mental maupun keterampilan sangat sulit dilakukan.

3. Faktor lembaga atau instansi pelaksana, apabila organisasi pelaksana kebijakan telah memiliki SDM yang berkualitas dan fasilitas yang mendukung, maka instasi yang terkait dapat dengan mudah membagi wewenang dan tanggung jawab kepada setiap SDM tersebut dengan jelas. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan yang dibebankan kepada setiap SDM yang dimiliki. Pembagian wewenang dan tanggung jawab juga akan memberikan penekanan pada setiap SDM untuk bisa menyelesaikan beban kerja yang telah diberikan organisasi.
4. Faktor ketegasan penegakan sanksi, bahwa penegakan sanksi belum dilakukan sesuai dengan ketentuan pidana Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 Pasal 29 Ayat (1&2) bahwasanya :

   (1) Barang siapa melangar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3 dan pasal 4 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan piana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah),

   (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelangaran.

   Tetapi dilapangan sanksi tersebut tidak ditegakkan atau dilaksanakan, sehingga pengemis tidak jera dan mereka akan kembali mengemis dijalanan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneliti dan analisis yang penulis lakukan, bahwa meskipun undang-undang ini sudah lama diterapkan tapi fakta yang ditemukan di lapangan masih banyak gepeng yang berkeliran di Kota Pekanbaru, dan berdasarkan empat indkator yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Maka dari itu penulis menarik beberapa kesimpulan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Studi Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru dianatranya yaitu sebagai berikut:

1. Untuk indikator Komunikasi karena Dinas Sosial dan Satpol PP sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan informasi kepada gelandangan dan pengemis, masyarakat Kota Pekanbaru baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sosialisasi, media dan memasang baleho serta membagikan brosur.
2. Untuk indikator Sumber Daya di lihat dari Dinas Sosial itu sendiri masih kurangnya sumber daya manusia dalam penanganan gepeng sehingga mereka bekerjasama dengan Satpol PP terkait sumber daya yang ada.
3. Untuk indikator Disposisi Dinas Sosial dan Satpol PP sudah melaksanakan tugas dan fungsinya akan tetapi belum optimal dalam melaksanakan tugasnya karena gelandangan dan pengemis yang tidak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mematuhi peraturan Undang-Undang Ketertiban Sosial yang sudah ditetapkan.

4. Untuk indikator Struktur Birokrasi sudah menetapkan SOP dan sudah bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing.
5. Penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru tentunya menjadi tanggung jawab bersama semua pihak. Karena gelandangan dan pengemis adalah kenyataan sosial kemasyarakatan yang disebabkan oleh faktor kemiskinan, pendidikan yang rendah. Dan perlu dilakukan penanganan secara efektif, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai kalangan baik dari masyarakat maupun pemerintah Kota Pekanbaru.

B. Faktor-faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru)

1. Faktor lingkungan, dimana masih kurangnya dukungan dari lembaga-lembaga sosial maupun pihak-pihak swasta dalam mengatasi masalah gelandangan dan pengemis, begitu juga dengan kurangnya dukungan dari masyarakat untuk mengatasi gelandangan dan pengemis ini membuat uasha yang di lakukan pemerintah dalam mengatasi masalah ini menjadi lebih sulit.
2. Faktor sumber daya manusia, kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial sangat terbatas sehingga kemampuan untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melakukan pembinaan baik mental maupun keterampilan sangat sulit dilakukan.

3. Faktor lembaga atau instansi pelaksana, apabila organisasi pelaksana kebijakan telah memiliki SDM yang berkualitas dan fasilitas yang mendukung, maka instasi yang terkait dapat dengan mudah membagi wewenang dan tanggung jawab kepada setiap SDM tersebut dengan jelas. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan yang dibebankan kepada setiap SDM yang dimiliki. Pembagian wewenang dan tanggung jawab juga akan memberikan penekanan pada setiap SDM untuk bisa menyelesaikan beban kerja yang telah diberikan organisasi.
4. Faktor ketegasan penegakan sanksi, bahwa penegakan sanksi belum dilakukan sesuai dengan ketentuan pidana Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 Pasal 29 Ayat (1&2) bahwasanya :

   (1) Barang siapa melangar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3 dan pasal 4 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan piana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah),

   (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelangaran.

   Tetapi dilapangan sanksi tersebut tidak ditegakkan atau dilaksanakan, sehingga pengemis tidak jera dan mereka akan kembali mengemis dijalanan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Dinas Sosial Kota Pekanbaru harus bekerjasama dengan Satpol PP serta lembaga-lembaga sosial maupun pihak swasta yang terkait dengan penanganan gelandangan dan pengemis, dan pihak kepolisian untuk lebih mencari tahu motif keberadaan gelandangan dan pengemis tersebut.
2. Untuk Dinas Sosial harus lebih meningkatkan SDM yang berkualiats, karena dengan adanya SDM yang berkualitas dan unggul akan memberikan kemudahan bagi organisasi pelaksana untuk bisa mewujudkan kebiijakan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan manfaat yang ingin dicapai.
3. Untuk Dinas Sosial harus membagi tugas wewenang dan bertangung jawab kepada setiap SDM dengan jelas agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pembagian tugas kepada setiap SDM yang dimiliki.
4. Untuk Dinas Sosial jika sanksi yang diberikan kepada gepeng dan masyarakat tidak berjalan dengan baik, sebaiknya sanksi tersebut lebih dipertegas supaya gelandangan dan pengemis sedikit berkurang dan tidak ada lagi masyarakat yang memberi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Donni Juni Priansa & Agus Garnida. 2013. *Manajemen Perkantoran: Efektif, Efisien, dan Profesional*. Bandung: Alfabeta.

Keban, Y.T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media

Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Robbins, Stephen P. 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Desain, dan Aplikasi*. Jakarta: Arcan.

Zulkifli., Awang, Azam., dkk. 2013. *Buku Panduan Penulisan: Usulan Penelitian, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru: Fisipol UIR.

Zulkifli & Moris A. Yogia. 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen (Suatu Bacaan Pengantar)*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

Wirawan. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia (Teori, aplikasi dan penelitian)* Jakarta.Selamba Empat; 2009.

Mahmudi. 2010. *Manajemen kinerja sektor publik,* Yogyakarta: Unit Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mathis, Robert L, 2002, Manajemen *sumber daya manusia*, Salemba Empat, Jakarta.

Fahmi, Irham. 2014. *Manajemen kepemimpinan Teori & Aplikasi*. Bandung : Alfabeta.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hasibuan, Malayu S. P. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia (edisi revisi).* Jakarta: Bumi Aksara Prahasta.

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Syafiie, Kencana Inu. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI).* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Siagian, P. Sondang. 1999. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.

WINARNO, Budi 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.

Feriyanto, Andri., & Triana, Endang, Shyta. 2015. *Pengantar Manajemen (3 in 1)*. Kebumen: Media Tera.

Anggito, Albi & Johan Setiawan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Ath-Thawil, Nabil Subhi. (1985). *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-negara.* Bandung: Mizan.

Departemen Sosial RI. (1991*) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Gelandangan dan Pengemis*. Jakarta, R. Sihombing.

Saparinah. (1988*) Perilaku Gelandangan dan Penanggulangannya dalam Paulus Widayanto . gelandangan Pandangan Ilmu Sosial.* Jakarta: LP3ES.

Sutomo. (2000). *Masalah Sosial dan Pembangunan*, Jakarta: Pustaka Jaya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Suparlan, Parsudi. (1981). *Gelandangan Sebuah Koneksi Perkembangan Kota*. Jakarta: LP3ES.

Perundang-undangan

Peratuaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial RI No 08 Tahun 2012 Tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Peraturan Menteri Sosial RI No 80 I HUK I 2010 Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :